KEBIJAKAN PELARANGAN MEDIA TIKTOK SEBAGAI BENTUK SEKURITISASI DI AMERIKA SERIKAT DI MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP PADA TAHUN 2020

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

RAHMADHANIAH PUTRI ICHWAN

18323097

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

KEBIJAKAN PELARANGAN MEDIA TIKTOK SEBAGAI BENTUK SEKURITISASI DI AMERIKA SERIKAT DI MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP PADA TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

RAHMADHANIAH PUTRI ICHWAN

18323097

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Kebijakan Pelarangan Media TikTok sebagai Bentuk Sekuritisasi di Amerika Serikat di Masa Kepemimpinan Donald Trump

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

13 April 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
2	Willi Ashadi S.H.I., M.A.	
3	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

19 April 2022



RAHMADHANIAH PUTRI ICHWAN

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

HALAMAN PERSEMBAHAN



Yang paling utama dari segalanya

Sujud dan puji syukur kepada Allah SWT. Berkat nikmat, karunia hingga kasih sayang telah Engkau berikan kepadaku memberikakku kekuatan yang tidak pernah aku duga. Terima kasih atas segala kelancaran dan kemudahan yang Engkau berikan kepadaku di setiap langkahku dan prosesku dalam menyusun skirpsi ini hingga sampai di tahap ini. Sholawat dan pujian pun selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang saya sayangi, sebagai rasa terima kasih, hormat dan bakti yang tidak terhingga yang selalu menjadi alasanku untuk tetap bertahan

"Bapak dan Ibu Tercinta"

Berkat do'a mu yang selalu mengiringi langkahku sehingga aku bisa sampai di titik ini

"Kedua Adikku"

Terima kasih selalu memberikan kebahagian dan tawa kepada kakakmu ini. Jadilah adik yang berbakti dan selalu menjadi orang baik untuk orang-

orang di sekitar kalian. Maaf belum dapat menjadi kakak yang baik tapi kakak akan selalu mencoba yang terbaik untuk kalian

HALAMAN MOTO

Jika kamu merasa kesulitan, ingatlah bahwa Allah berfirman:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"Just don't hurt yourself. Whatever it is. Just because you have lots of stress, it doesn't mean that you have to relieve it by hurting yourself. Because you never know what's going happen in the future."

Bangchan, Stray Kids

"Your pace is the best. Don't worry"

Rahmadhaniah Putri Ichwan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yanfg Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunianya yang Ia berikan memberikan kekuatan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis sadar bahwa selama menyelesaikan tugas akhir ini telah melibatkan banyak sekali pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tiada henti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang memberikan penulis kekuatan, karunia, kesehatan dan kelancaran bagi untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan kekurangan yang ada.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dan dosen-dosen serta staf prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, nasihat serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rahmat dan hidayah-Nya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dosen.

5. Ibu Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas ilmu, nasihat dan bimbingan yang telah Ibu berikan selama saya kuliah hingga menyusun skripsi. Semoga Ibu sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, selalu dilindungi Allah dan dilimpahi rahmat dan hidayah-Nya. Mohon maaf sebesar-sebesarnya saya kepada Ibu apabila jika saya pernah berbuat salah dan sekali lagi terima kasih.

6. Kedua orang tua saya, Bapak Amru Ichwan dan Ibu Hairiah yang do'anya selau mengalir dan mendukung saya agar tidak menyerah. Tidak lupa selalu mengingatkan saya untuk tidak lupa beribadah kepada Allah, berbuat baik dan tetap semangat dalam melaksanakan kewajiban. Terima kasih sudah berjuang membawa saya hingga sampai di titik ini. Sehat selalu pak, mah, doakan semoga saya dapat meraih apa yang saya inginkan, Aamiin.

7. Kedua adikku, Lu'lu dan Fadil. Terima kasih selalu memberikan kakak senyum dan tawa. Jadilah anak dan adik yang sholeh dan sholehah. Selalu jadi orang baik dan raihlah mimpi dan keinginan kalian namun jangan lupakan ibadah yang selalu diingatkan oleh orang tua.

8. Untuk kelurga STAY-deul, Mak Rose, Kad Dhea, Kak Nadia, Mia, Tri, Lifki, Tiwik, Tika. Terima kasih banyak sering mendengarkan keluh kesahku. Terima sudah menjadi pendengar terbaikku. Terima kasih sudah mau menjadi keluarga keduaku selama kurang lebih 4 tahun. Aku sangat bersyukur kita dapat dipertemukan sama Allah lewat Stray Kids. Terima kasih sudah banyak membantuku di masa-masa sulitku. Maaf jika aku sering merepotkan kalian. Aku menyayangi kalian sepenuh hati. Ayo kita selalu bersama untuk waktu yang lebih lama. *You Make Me STAY.*

9. Untuk teman kuliah seperjuanganku, Jihan dan Alda. Terima kasih sudah menjadi temanku selama perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan dan nasihat yang pernah kalian berikan. Terima kasih sudah menjadi pendengar keluh kesahku selama ini. Maaf jika aku belum bisa terbuka sepenuhnya kepada kalian. Maaf aku belum bisa menjadi teman yang baik untuk kalian. Tapi aku benar-benar bersyukur bisa bertemu dengan kalian. Semoga kita akan selalu berteman walau saat perpisahan nanti tiba. Aku menyayangi kalian selalu.

10. Untuk Stray Kids, Bangchan, LeeKnow, Changbin, Hyunjin, Han. Felix, Seungmin, dan I.N., lagu dan musik kalian benar-benar menjadi sebuah penyemangat yang luar biasa disaat aku berada di titik terendah. Terima kasih atas dukungan kalian sampaikan lewat lagu yang kalian ciptakan dan segala tutur kata penyemangat kalian di berbagai kesempatan. Kalian menjadi salah satu motivasi dan inspirasi terbesarku untuk tetap bertahan, berjuang dan berkembang hingga di titik ini. Kalian memberikan warna terindah di masa mudaku. Berkat kalian, aku banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. *Stray Kids Everywhere All Around the World, You Make Stray Kids STAY.*

11. Untuk semua teman-teman Hubungan Internasional Univeristas Islam Indonesia angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sudah banyak membantu saya selama di masa perkuliahan. Terima kasih sudah mau berteman dengan saya.

12. Untuk almamater tercinta Universitas Indonesia yang sangat saya kagumi dan banggakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR xi
ABSTRAK xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Cakupan Penelitian 8
1.5 Argumen Sementara 9
1.6 Tinjauan Pustaka 9
1.7 Landasan Konseptual 14
1.8 Metode Penelitian 18
A. Jenis Penelitian 18
B. Subjek Penelitian 19
C. Metode Pengumpulan Data 19
D. Proses Pengumpulan Data 19
1.9 Sistematika Pembahasan 19
BAB 2 Analisis kebijakan Pelarangan TikTok dalam Upaya Amerika sebagai Bentuk Sekuritsasi 21
2.1 TikTok dan Keamanan Nasional 21
2.2 Pertumbuhan TikTok di Amerika Serikat dan Global 23
2.3 Digital Literacy di Amerika Serikat 26
2.4 Langkah Sekuritisasi menurut Teori Sekuritisasi dalam Pelarangan TikTok di AS 27
BAB III Konteks Politik Domestik dan Internasional dalam Kebijakan Pelarangan TikTok dalam Sekuritsasi 41
3.1 Tiongkok sebagai Ancaman bagi Amerika Serikat 41
3.2 Tindakan Penyediaan Cloud Secure dan Pembelian Saham ByteDance oleh Orace 48
3.3 Pengaruh Kebijakan Pelarangan TikTok terhadap Sejumlah Aktor 55

3.3.1 Respon dari Tiongkok 55
3.3.2 Respon dari ByteDance 55
3.3.3 Respon dari Oracle 56
3.3.4 Respon dari Publik 56
3.4 Akhir dari Kebijakan Pelarangan TikTok 57
BAB IV PENUTUP 59
4.1 Kesimpulan 59
4.2 Rekomendasi 60
DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 2.2.1 Diagram penggunaan aplikasi oleh masyarakat Amerika Serikat di tahun 2021

Gambar 2.2.2 Diagram Jumlah Pengguna Media Sosial di AS berdasarkan Umur

Gambar 2.3.1 Grafik Hasil Survei mengenai 10 pertanyaan mengenai *digital topic*

Tabel 2.4.1 Proses Sekuritisasi Pelarangan TikTok di AS menurut Teori Sekuritisasi

Gambar 2.4.2 Persentase Pandangan Amerika terhadap Tiongkok

Gambar 2.4.3 Persentase *College-Educated* dan orang Amerika yang Lebih Tua yang Memiliki Pandangan Tidak Baik terhadap Tiongkok

Gambar 2.4.4 Pesentase Kenaikan Pandangan Buruk Kedua Partai (Republikan dan Demokrat) di AS terhadap Tiongkok

Abstrak

Keberadaan TikTok di Amerika memberikan kekhawatiran bagi pemerintahan Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump. Kebijakan Trump yang keras terhadap media sosial yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari Tiongkok, ByteDance didasari oleh alasan keamanan nasional. Besarnya jumlah pengguna TikTok di Amerika Serikat memberikan kekhawatiran akan pencurian data pribadi bagi para penggunanya dan akan disalahgunakan oleh perusahaan pemilik TikTok tersebut. Kekhawatiran pencurian data dan spionase yang diasumsikan akan disalurkan ke pemerintahan Tiongkok—khususnya oleh Partai Komunis Tiongkok yang diasumsikan Trump membuat TikTok terancam untuk dilarang digunakan di Amerika Serikat. Dengan adanya *speech act* yang dilakukan Trunp ke media dan pernyataannya di White House pada tanggal 6 Agustus 2020 mengambil langkah *national emergency* dan melarang TikTok di AS. Namun Trump memberi kesempatan bagi perusahaan AS untuk membeli TikTok. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, penulis menganalisis tindakan yang diambil Trump ini dengan menggunakan teori sekuritisasi. Argumen sementara terhadap permasalahan ini adalah tindakan Trump dalam melarang TikTok ini tidak hanya karena melindungi keamanan nasionalnya, namun juga kegagalannya dalam kampanyenya di Tulsa, Oklahoma akibat video TikTok yang tersebar untuk membeli tiket *rally campaign*-nya tanpa menghadirinya. Ada asumsi rencana Trump untuk membeli TikTok tidak hanya untuk melindungi keamanan nasional, namun agar dapat mengontrol aplikasi tersebut dan memiliki teknologi algoritma yang menjadi kunci kepopuleran aplikasi yang menampilkan video singkat tersebut.
Kata kunci: TikTok, Tiongkok, ByteDance, Sekuritisasi, Amerika Serikat,

Abstract

The existence of TikTok in America is a concern for the United States government during the Donald Trump administration. Trump's tough policy on social media owned by Chinese company ByteDance is based on national security reasons. The large number of TikTok users in the United States raises concerns about the theft of personal data for users and will be misused by the company that owns TikTok. Fears of data theft and espionage are assumed to be funneled into the Chinese government—particularly by the Chinese Communist Party which Trump assumes puts TikTok at risk of being banned from use in the United States. With the speech act that Trump made to the media and his statement at the White House on August 6, 2020, he took a national emergency measure and banned TikTok in the US. But Trump gave US companies a chance to buy TikTok. By using securitization theory, the author analyzes the actions taken by Trump using securitization theory. The provisional argument against this issue is that Trump's action in banning TikTok is not only because it protects his national security, but also his failure in his campaign in Tulsa, Oklahoma due to TikTok videos circulating to buy tickets for his rally campaign without attending. There is an assumption that Trump's plan to buy TikTok is not only to protect national security, but to be able to control the application and have the algorithm technology that is the key to the popularity of the application that displays the short video.
Keyword: TikTok, China, ByteDance, Securitization, USA,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, peran media dalam menyalurkan informasi terus menerus berkembang dari tahun ke tahun. Dimulai dari munculnya media tradisional seperti televisi, koran, radio dan lain sebagainya hingga pada akhirnya semakin berkembang dengan munculnya media baru yaitu media sosial seperti Instagram, Twitter, blog, dan lainnya. Croteau (1997:12) menyatakan bahwa media baru adalah sebuah perangkat media yang timbul dari efek inovasi teknologi di bidang media yang didalamnya meliputi televisi kabel, satelit, teknologi *optic fiber* dan komputer (Kurnia 2005, 292). Munculnya media baru membentuk sebuah kelompok baru yakni masyarakat informasi sesuai dengan pendapat Mc Quail yang menyatakan bahwa masyarakat informasi merupakan '*dependent upon complex electronic information and communication network and which allocate a major portion of their resources to information and communication activies"* (Kurnia 2005, 293).

Teknologi pun dapat mengubah cara para aktor dalam mengambil keputusan serta pembuatan kebijakan. Media baru memiliki peran yang sama dengan media tradisional di dunia internasional. Media dapat menggerakan negara lain untuk merespon suatu isu dan melakukan sebuah tindakan, pertukaran informasi, dan lain sebagainya. Hanya saja jangkauannya menjadi lebih luas dan tanpa batas. Media tradisional jangkauannya lebih sempit dibandingkan media

baru. Sementara itu media baru tentu lebih menarik minat anak muda, terutama penyampaian pendapat dalam berpolitik atau merespon isu-isu nasional maupun internasional. Sifat media baru yang individual, menyampaikan pendapat secara tidak langsung dengan disediakan forum media sosial, interaksi yang tidak langsung memberikan ketertarikan dan kebebasan berekspresi tersendiri bagi para penggunanya.

Diperkuat dengan kutipan pada jurnal yang ditulis Yonghwan Kim dan Hsuan Ting Chen (Chen and Kim 2016, 322) dalam tulisan mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang berkomunikasi dengan jaringan yang lebih besar akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Media sosial sering menjadi sarana untuk setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi yang tersedia dalam kebebasan berkomunikasi (Susanto 2017, 386). Hal ini membuat masyarakat menggunakan media baru sebagai perwujudan *freedom from speech* dan menggunakan media sosial sebagai alat untuk mereka untuk berpolitik dan berdemokrasi. Dipertegas oleh Ganley (dalam Ward, 1995:284) bahwa media baru memberikan kesempatan lebih bagi individu sebagai warga negara biasa sekaligus konsumen atau pengguna media baru dalam meningkatkan akses informasi sehingga lebih terinformasi secara politis yang memungkinan meningkatkan demokrasi (Kurnia 2005, 294). Namun sebenarnya media baru ini lebih dikuasai oleh unit terkecil negara yaitu masyarakat dari berbagai kalangan.

Namun jika media tidak digunakan dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, disinformasi, dan kesalahpahaman yang akan memicu konflik antarnegara. Contohnya adalah masalah keamanan atau privasi sebuah negara. Menggunakan *soft power* seperti budaya dan media baru menjadi alternatif terbaik bagi negara untuk bersaing. Pengaruhnya pun tak hanya menyerang politik domestik namun juga keamanan, ekonomi dan perdagangan internasional.

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump memiliki banyak kontroversi yang terjadi, salah satunya adalah dengan adanya pelarangan aplikasi Tiktok di AS. Tiktok merupakan salah satu aplikasi buatan ByteDance, salah satu perusahaan teknologi multinasional dari Tiongkok yang berpusat di Beijing. Pada Agustus 2020, Amerika akan melarang Tiktok sepenuhnya dikarenakan diklaim keberadaannya mengancam keamanan dari Amerika. Diasumsikan keberadaan aplikasi ini akan mengancam keamanan data pribadi warga Amerika. Akan tetapi dari pihak TikTok sendiri membantah hal tersebut. Pihak TikTok menyatakan bahwa data pengguna warga AS dijamin keamanan dan dijaga kerahasiaannya sepenuhnya. Data yang tersimpan pun berlokasi di luar China dengan tujuan agar data warga AS tidak tersimpan bersama dengan data pengguna diluar AS.

Hingga pada akhirnya pada September 2020, lewat Microsoft, Donald Trump "memberikan" mandatnya kepada salah satu perusahaan teknologi besar Amerika ini untuk membeli aplikasi tersebut dan bernegosiasi terlebih dahulu dengan ByteDance. Namun Microsoft gagal dalam usaha akuisisi tersebut. Namun Oarcle berhasil bekerjasama dnegan TikTok dan akan menyediakan layanan *cloud*

apabila Trump menyetujui sehingga memberi waktu bagi kedua perusahaan ini untuk melakukan kesepakatan agar TikTok tidak dilarang sepenuhnya apabila tidak melewati batas pelarangan pada 20 September. Pihak TikTok lewat pernyataannya di email menyatakan kekecewaannya terhadap pelarangan tersebut. Disebutkan juga TikTok telah berkomitmen terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas tambahan, verifikasi keamanan kode, dan pengawasan pemerintahan AS terhadap keamanan data AS. Penyedia teknologi Amerika akan bertanggung jawab dalam memelihara dan pengoperasian jaringan Tiktok di AS.

Hingga pada akhirnya, dilansir dari CNBC (19/09/2020) Oracle, salah satu perusahaan teknologi komputer multinasional Amerika berhasil melakukan pembelian saham sebesar kurang lebih 12,5%.. Data pengguna TikTok akan dialokasikan ke infrastruktur *cloud* Oracle. Dikutip dari CNBC (21/09/2020), CEO dan pendiri ByteDance, Zhang Yiming yang memiliki saham tentu akan mendapatkan kursi di TikTok Global yang menjadi anak perusahaan sehingga akan ada pemegang kendali dari sudut pandang ByteDance, walaupun 4-1 kursi pemegang saham merupakan milik AS serta investor dari AS, Tiongkok dan internasional memiliki mayoritas di saham tersebut. Untuk saat ini Oracle akan mendapatkan akses untuk mengetahui pembaharuan yang dapat mengancam keamanan sehingga dapat melakukan tindakan pelarangan. sementara itu kuasa penuh tetap berada di tangan ByteDance dalam menangani algoritma rekomendasi video yang muncul di TikTok sebagai bentuk faktor dari kepopularitasan aplikasi. Sehingga, Amerika tidak memiliki hak penuh dalam kepemilikan teknologi, kepemilikan maupun tata kelola.

Walaupun terdapat TikTok Global yang berbasis di AS dan Oracle menjadi salah satu pemegang sahamnya, Bytedance menegaskan pemegang saham dan kontrol terbesar tetaplah mereka karena investor, kursi dewan perusahaan dan perusahaan mayoritas dari Tiongkok. Namun dalam pernyataan Mike Pompeo, Tiktok Global akan "dikendalikan oleh Amerika" dalam wawancara dengan "Sunday Morning Futures" Fox News dan menyatakan bahwa ByteDance merupakan "pemegang saham pasif". Dengan "gelar pemegang saham pasif" tersebut, Pompeo mengatakan bahwa ByteDance tidak memiliki akses ke perusahaan, tidak ada otoritas pengambilan keputusan, hingga kemampuan untuk melihat apa yang mereka lakukan (Kharpal 2020).

ByteDance sendiri tidak akan memberikan teknologi atau algoritma ke perusahaan AS. Sudah beberapa kali dari pihak AS menyatakan bahwa TikTok menjadi ancaman keamanan nasional dikarenakan data masyarakat AS yang menggunakan TikTok dapat diakses dari Beijing dan pihak TikTok terus membantah akan hal tersebut. Perusahaan induk yang ada di Beijing bersitegas tidak akan hilang kendali atas aplikasi TikTok.

TikTok menjadi sebuah media perwujudan bagi masyarakat Amerika untuk berekspresi dan komentar politik terutama bagi kaum muda. Namun kemunculan media baru ini dalam memberikan kemudahan dalam *freedom of speech* dikhawatirkan dapat menjerumuskan individu lainnya untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara atau pemilu, mendapatkan informasi yang tidak valid, hingga memberontak kepada pemerintah. Kejadian "kegagalan" kampanye Trump di Tulsa menjadi salah satu gambaran besar pengaruh dari media baru.

Kemudian gerakan *#BlackLivesMatter* yang viral memberikan gambaran buruk bagi negara Amerika yang dipandang sebagai negara pencetus HAM. Penyebaran informasi yang sangat cepat karena adanya *networking* memberikan dampak yang sangat signifikan.

Ada asumsi bahwa akuisisi perusahaan aplikasi ini hingga ingin membeli TikTok tersebut tak hanya sekedar kekhawatiran dengan keamanan data masyarakat Amerika, namun adanya asumsi pribadi Trump pada saat masa kampanye pemilihan presiden di tahun 2020 tersebut. Warga Amerika membeli tiket tersebut secara *online* namun tak menghadiri acara kampanye tersebut di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan terdapat video Tiktok yang menyuarakan untuk tidak menghadiri acara kampanye Trump tersebut. Karena ByteDance yang memiliki kontrol penuh terhadap algoritma video rekomendasi di TikTok, dikhawatirkan terdapat video viral yang dilihat oleh pengguna TikTok dan dapat memberikan kesan buruk terhadap Amerika Serikat di mata dunia, terutama AS dibawah kepemimpinan Donald Trump. Alasan lain adalah karena adanya permasalahan geopolitik, perbedaan nilai politik, hingga persaingan di wilayah regional serta global antara AS dan Tiongkok. Kemudian permasalahan tarif dalam perang dagang yang terjadi diantara kedua negara ini karena banyaknya ketidaksepakatan yang pada akhirnya merambat ke industri teknologi

TikTok sendiri akhirnya mendapatkan ancaman *banning* oleh Amerika Serikat dengan alasan masalah keamanan data pengguna TikTok masyarakat Amerika yang ditangani oleh induk perusahaan TikTok, ByteDance yang berbasis

di China. Permasalahan tersebut naik dengan adanya *speech act* yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan AS, Presiden Trump, hingga Sekretaris Negara Mike Pompeo yang menyatakan jika Tiktok akan mengancam keamanan nasional, ekonomi,hingga kebijakan luar negeri AS. Namun Tiktok membantah tuduhan tersebut karena tidak adanya bukti jika data yang dimiliki oleh ByteDance diberikan ke pemerintah Tiongkok.

Dalam tulisan ini saya akan membahas faktor tindakan Amerika Serikat yang melakukan tindakan pelarangan aplikasi media TikTok dengan asumsi ancaman keamanan serta tindakan yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara dalam menangani kasus ini di masa Pemerintahan Donald Trump.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Trump melakukan sekuritisasi terhadap media baru Tiktok pada masa pemerintahan Donald Trump di tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui latar belakang tindakan pelarangan Tiktok di AS di masa pemerintahan Donald Trump
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Tiongkok dan Amerika dalam kasus sekuritisasi ini.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian mengenai media sosial dan teknologi mempengaruhi hubungan politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa kepemimpinan Donald Trump di tahun 2020 ini berfokus pada kebijakan pelarangan penggunaan Tiktok di Amerika Serikat. Terdapat alasan tindakan pelarangan Tiktok yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi politik domestik AS namun juga alasan keamanan hingga kompetisi antara AS dengan Tiongkok yang pernah terjadi sebelumnya akan dibahas Perusahaan besar teknologi Microsoft dan Oracle dari Amerika serta ByteDance dari Tiongkok berpengaruh dalam kebijakan pelarangan Tiktok ini.

Dibahas juga pengaruh masuknya Tiktok di Amerika Serikat sehingga diambilnya tindakan pelarangan pada masa pemerintahan Donald Trump. Seperti yang diketahui pengembangan teknologi kedua negara ini sangat berkembang pesat sehingga Amerika Serikat meningkatkan *concern* terhadap keamanan. Rivalitas atau persaingan perusahaan teknologi media kedua negara ini sangat kuat seiring berkembangnya teknologi dan globalisasi. Dinamika politik dan ekonomi atas pengaruh berkembangnya Tiktok di AS akan melengkapi penelitian ini.

Rentang tahun cakupan penelitian diambil mulai Agustus 2020 karena saat telah terdapat *speech act* dari petinggi negara seperti Donald Trump yang menyatakan Tiktok telah menjadi sebuah ancaman keamanan nasional karena mereka dapat mengakses data pengguna TikTok warga AS.

1.5 Argumen Sementara

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sosial media dan teknologi semakin berkembang pesat dari zaman ke zaman. Informasi yang semakin mudah didapatkan dan disebarkan serta didukung oleh teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengaksesnya. Hal ini membuat dinamika politik, ekonomi, dan perdagangan dan keamanan sangat mendominasi di ranah tersebut. Isu yang diangkat adalah bagaimana Amerika Serikat melakukan pelarangan penggunaan TikTok AS untuk menjamin data pengguna TikTok di AS. Dapat disimpulkan bahwa tindakan AS ini merupakan sebuah tindakan sekuritisasi sesuai dengan teori sekuritisasi yang dinyatakan oleh Bary Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wild di dalam sebuah buku yang berjudul Security: A New Framework for Analysis di tahun 1998.

1.6 Tinjuan Pustaka

Penelitian atau kajian mengenai pengaruh teknologi dan media baru terhadap hubungan politik antara Amerika dan China dapat dilihat dari berbagai jurnal artikel yang telah atau akan saya gunakan sebagai pendukung penulisan. Seperti artikel yang ditulis oleh Yonghwan Kim dari Pai Chai University dan Hsuan Ting Chen dari The Chinese University of Hong Kong. Artikel yang berjudul *Social Media and Online Political Participation: The mediating role of Exposure to Cross-Cutting and like-minded Perspective* menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan media sosial seperti blog dan berbagai situs jejaring sosial yang mudah sekali untuk diakses oleh banyak orang terutama penggunanya yang mayoritas membuat partisipasi mereka dalam melihat

fenomena politik menjadi lebih aktif. Dengan sosial media, individu dari berbagai kalangan dapat dengan mudah melakukan partisipasi politik. Namun literatur ini juga berfokus bagaimana pengaruh sosial media dan sedikit hal mengenai apa yang memediasi atau menengahi antara penggunaan media sosial dan warga dalam kegiatan partisipatif. Dalam jurnal ini saya akan menggunakan pandangan bagaimana masyarakat Amerika menggunakan Tiktok sebagai produk Cina untuk tidak menghadiri kampanye Donald Trump saat pemilihan presiden Amerika periode 2020-2025.

Pembahasan mengenai tulisan atau kajian ini terdapat pada buku yang berjudul *Encyclopedia of Social Media and Politic* yang di editori oleh Kerric Harvey. Buku ini cukup banyak menjelaskan berbagai hal mengenai, *social media*, *social network*, efek teknologi digital, mobilisasi online, aktor dan sosial media dalam politik dan lain sebagainya. Bagaimana sosial media benar-benar dapat menjadi tempat untuk melakukan politik, berpengaruh besar dalam arena politik, sejauh mana jika sosial media dalam mengganti posisi politik secara langsung seperti tatap muka, dialog, dan aksi-aksi yang dapat diangkat dengan mudah menggunakan sosial, dan masih banyak lagi.

Karena kajian ini juga akan sedikit menyinggung Tiktok sebagai produk Tiongkok yang telah diblokir oleh Amerika Serikat, saya menggunakan jurnal yang berjudul *Dancing to the Partisan Beat*: A *First Analysis of Political Communication on Tiktok* yang ditulis oleh Juan Carlos Media Serrano, Orestis Papakyriakopoulus dan Simon Hegelich yang berisi bagaimana Tiktok dapat menjadi alat dalam membuat arus politik di Amerika Serikat saat pemilihan

Presiden AS periode 2021-2025 serta siapa aktornya dan tujuan politiknya, melihat komunikasi politik di Tiktok dengan menyelidiki dari video dari kedua kubu (Republikan dan Demokrat), melihat bahwa Tiktok menjadi platform yang berbeda dari platform lainnya dan bagaimana penggunanya terlibat dalam diskusi politik.

Kemudian terdapat juga buku yang dieditori oleh Daniel Trottier dan Christian Fuchs yang berjudul *Social Media, Politic and the State* yang menjelaskan bagaimana sebuah kekuatan negara dan politik bersaing dan kegiatannya dalam sosial media. Buku ini akan menyatukan hubungan menjadi sebuah kesatuan yang satu mengenai sosial media, perkembangannya, negara, kebijakan dan pengawasannya serta melihat tindakan negara dalam konflik yang berhubungan dengan sosial media.

Acuan berikutnya berasal dari sebuah jurnal artikel yang berjudul "*The Securitization of Chinese Technology Companies in the United States of America*" yang menjelaskan bagaimana Amerika melakukan sekuritisasi terhadap berbagai perusahaan teknologi yang berasal dari Tiongkok di berbagai masa pemerintahan di Amerika Serikat. Di tahun 1998, Amerika telah memiliki kesadaran penuh akan keamanan siber, yang mana saat itu Donald J. Trump belum memerintah. Namun semenjak tahun 2016, saat pertama kali Donald Trump memenangkan pemilihan pada saat itu melawan Hillary Clinton, kebijakan dinilai cukup ekstrem, terutama dengan adanya kebijakan pelarangan beberapa produk dari perusahaan teknologi berdasarkan dalih keamanan nasional, khususnya dari perusahaan teknologi Tiongkok. Dalam tulisan ini menjelaskan kesuksesan pemerintahan Donald

Trump dalam melakukan sekuritisasi atas eksistensi perusahaan teknologi keras maupun lunak Tiongkok, membangun pandangan ancaman bagi keamanan, hingga privasi dan kebebasan di Amerika Serikat. Karena jurnal ini belum membahas mengenai tindakan sekuritisasi yang lebih mendalam terhadap TikTok, jurnal ini menjadi acuan dan perbandingan yang baik untuk membuktikan bahwa tindakan pelarangan

TikTok menjadi sebuah langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh presiden Donald Trump pada saat itu.

Dan yang terakhir adalah jurnal yang berjudul Media Sosial sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik yang ditulis oleh Eko Harry Susanto. Literatur ini menjelaskan dengan adanya kekuatan media sosial, berbagai ruang lingkup politik seperti partai politik dan kelompok politik, mereka menggunakan media sosial sebagai alat pendukung atau pendorong mereka untuk menyebarkan pengaruh atau kekuatan mereka ke masyarakat. Di tulisan ini juga akan mendeskripsikan pengguna media sosial dari berbagai kalangan tanpa memandang statusnya serta *networking* dalam media sosial yang dapat menegakkan nilai-nilai demokrasi negara.

Dari literatur yang saya sebutkan kebanyakan tidak secara spesifik menggambarkan hubungan politik Amerika Serikat dan Tiongkok akibat dari pengaruh teknologi dan media sosial dan lebih banyak mendeskripsikan peran media sosial di Amerika Serikat namun saya dapat menggunakan beberapa pendekatan yang sangat beragam dari para penulis untuk menjelaskan peristiwa yang akan saya angkat di dalam penulisan ini.

Peneliti sebelumnya lebih membahas mengenai bagaimana sosial media berperan dalam politik dalam dan luar negeri sebuah negara, sosial media sebagai forum yang paling mudah diakses bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status untuk berpartisipasi dan menyampaikan hak politik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh negara sebagai bentuk kekuatan baru disamping militer, media bagi masyarakat untuk melakukan aksi, protes, dan lain sebagainya. Posisi penelitian saya lebih kepada bagaimana negara lain yang menggunakan teknologi dari negara lain merasa bahwa hal tersebut akan mengganggu dinamika negaranya atau terinvensi dan merasa privasi negara terusik. Tiktok yang sendiri merupakan produk dari Cina dan digunakan secara bebas di Amerika dirasakan meresahkan bagi Amerika karena Tiktok menjadi media untuk menentang rezim-rezim yang dibuat oleh Donald Trump. Dan Amerika sendiri pun curiga apabila Tiktok ini akan menjadi alat untuk Cina mendapatkan data-data pribadi warga negara Amerika.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian para peneliti ataupun penulis sebelumnya adalah bagaimana teknologi dan media baru yang muncul sebagai perkembangan globalisasi yang menghilangkan batas negara menjadi sebuah faktor perubahan ataupun pembuatan kebijakan politik luar negeri dan bagaimana media baru mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat

1.7 Landasan Konseptual (Sekuritisasi)

Hubungan Internasional pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa, isu atau kasus yang terjadi dalam ranah internasional. Dan hal tersebut terjadi dengan adanya aktor-aktor yang berperan dalam membuat keputusan maupun melakukan tindakan. Aktor yang terlibat pun sangat beragam mulai dari negara yang biasanya mendominasi dan kemudian ada juga aktor non-negara seperti perusahaan multinasional yang tentu sangat berpengaruh dalam dinamika dan interaksi di dunia internasional. Dalam sebuah peristiwa atau isu internasional tentu ada interaksi atau komunikasi internasional. Komunikasi internasional memiliki karakter seperti;

a. Isu atau pesan yang disampaikan adalah isu internasional
b. Aktor atau komunikator yang berperan berasal dari berbagai negara
c. Medium atau media yang digunakan dalam melakukan komunikasi adalah dengan menggunakan media baru seperti media sosial maupun media berita

Globalisasi memberikan akses kemudahan bagi negara dan terutama individu, sebagai aktor yang paling banyak berperan dalam penggunaan media baru dalam menyampaikan pemikiran atau perspektif mereka terhadap isu internasional maupun domestik yang terjadi. Dan perspektif ini pun menjadi sebuah isu atau peristiwa yang diangkat di dunia internasional.

Dalam tulisan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana tindakan pelarangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap media sosial TikTok. Terdapat

beberapa objek yang dapat diteliti yaitu media baru yaitu TikTok yang dimiliki oleh Tiongkok. Kemudian aktor negara, yaitu pemerintahan hingga aktor non-negara seperti perusahaan multinasional seperti Oracle serta individu yang menggunakan media baru tersebut

Perusahaan Amerika Serikat bersifat kapitalis tanpa adanya intervensi dari pemerintah, akan tetapi dalam konteks perang teknologi yang saat ini memanas membuat pemerintah dapat ikut berperan. Hal ini dikarenakan sebuah negara menganggap kejadian ini bukan lagi sebagai kompetisi bisnis, namun lebih mengarah pada ancaman dari negara lain. Sehingga dapat dicontohkan saat pemerintah negara A mulai merasa bahkan ini adalah sebuah ancaman, mereka dapat mulai mengarahkan kebijakan-kebijakannya kepada perusahaan multinasional domestik untuk mulai mem-banned berbagai teknologi informasi yang dimiliki oleh negara B. Sehingga isu ini dapat kita analisis dengan teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh pakar yang tergabung dalam Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School).

Teori sekuritisasi ini sendiri muncul dari pemikiran tiga tokoh yaitu Bary Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wild di dalam sebuah buku yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* di tahun 1998. Teori ini memberikan kacamata baru terhadap adanya dua pandangan yang berbeda dari dua kelompok: kelompok yang melihat ancaman itu merupakan hal yang subjektif, dan kelompok lainnya yang melihat ancaman itu secara objektif (Wilde et all.1998, 30) Dengan adanya perdebatan ini, Copenhagen School menyarankan jika suatu masalah tidak harus menjadi sebuah ancaman untuk keamanan dikarenakan adanya ancaman

eksistensial yang nyata, namun karena masalah-masalah tersebut diperlihatkan dan ditetapkan oleh aktor-aktor utama—pemerintah atau penjabat negara. Dengan kata lain, bagaimana masalah tersebut dapat dikonstruksi secara sosial sebagai sebuah ancaman. Buzan menyatakan terdapat 3 langkah sekuritisasi yang berhasil dalam mencegah sebuah masalah sekuritisasi, yaitu (1) mengidentifikasi masalah atau ancaman eksistensial: (2) tindakan/respon darurat; dan (3) pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit yang terlibat dengan melanggar aturan (Wilde et al. 1998, 26)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa awalnya isu yang ada dilihat sebagai persaingan atau kompetisi dalam bisnis. Namun seiring berjalannya waktu mulai muncul konflik sehingga isu tersebut yang awalnya bukan isu keamanan dapat disekuritisasi (dijadikan sebagai isu keamanan) apabila aktor yang terlibat mulai angkat suara (*speech acts*) untuk meyakinkan publik bahwa isu ini merupakan isu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. *Speech act* menjadi sebuah kunci utama dari sekuritisasi. Sehingga teori atau pandangan atau perspektif ini memberikan pandangan yang luas bagi para peneliti mengenai keamanan dengan menyatukan unsur keamanan tradisional (keamanan negara) dan unsur keamanan non tradisional (keamanan manusia) (Hadiwinata 2017, 3).

Pandangan sekuritisasi ini membuat aktor-aktor yang terlibat akan melakukan tindakan diluar batas atau agresif dan komprehensif untuk mempertahankan posisi dan keberlangsungannya. Keamanan saat ini dilihat tidak dari ancaman militer seperti pandangan keamanan tradisional namun berkembang

lebih luas sekali terutama dalam bidang teknologi seperti *cyber war*, perang hybrid dan lain sebagainya yang akan mengancam data-data rahasia negara. Sehingga hal ini bukan lagi menjadi sebuah masalah keamanan politik biasa namun sudah berada di tingkat ancaman keamanan politik darurat.

Dapat terlihat terdapat penekanan permasalahan bahwa sebenarnya isu keamanan ini tidak terlihat nyata dikarenakan ini hanya asumsi yang dinyatakan oleh Donald Trump bahwa teknologi Tiongkok mengancam walau dari pihak Tiongkok sendiri membantah akan hal tersebut. Pada akhirnya dengan pernyataan Donald Trump, isu ini menjadi sebuah ancaman yang dianggap nyata. Dengan menggunakan mazhab Kopenhagen, segala sesuatu yang dapat mengancam keamanan sebuah kelompok, entitas yang memiliki nilai tertentu, ideologi, maupun cara hidup dapat dinyatakan sebuah ancaman sekuritisasi atau masalah keamanan.

Saat ini ancaman yang diberikan oleh negara lain tidak hanya berdampak kepada negaranya saja, namun juga kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dengan tidak adanya batas atas hadirnya globalisasi dan *network* tentu akan sulit bagi negara untuk mengontrol aktifitas warga negaranya dalam mengakses teknologi dan media baru seperti media sosial. Sehingga salah satu cara bagi negara untuk membendung ancaman tersebut adalah menutup akses secara keseluruhan dengan memblokir atau melarang media baru yang dirasa mengancam keamanan negara dan masyarakat.

Dengan penjelasan konsep sekuritisasi yang telah dijelaskan, penulis akan menganalisis bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang

diarahan Donald Trump dalam melarang berbagai produk teknologi informasi komunikasi serta aplikasi media baru berupa media sosial buatan Tiongkok merupakan sebuah tindakan yang dapat mengurangi resiko penyerangan keamanan negaranya. Awalnya isu ini hanya dilihat sebagai persaingan bisnis antara kedua perusahaan multinasional namun dengan adanya pernyataan Donald Trump bahwa teknologi buatan Tiongkok adalah sebuah ancaman, tindakan *banned* pun dilakukan sehingga mempengaruhi kebijakan yang berujung pada memburuknya hubungan kedua negara tersebut. Sehingga kebijakan Amerika Serikat dalam mem-banned seluruh teknologi buatan Tiongkok merupakan tindakan atau langkah sekuritisasi.

1. 8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Peneltian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yang mengandalkan sumber-sumber dari literatur. Berdasarkan definisinya penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data-data dalam bentuk rangkaian kata-kata. Pengumpulan data dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara maupun dari data-data laporan resmi. Terdapat dua metode pengumpulan data yaitu primer dari sekunder. Primer sendiri data yang dapat diambil dari laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi seperti PBB dan lain sebagainya. Untuk data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari literatur seperti jurnal, artikel, buku dan sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk judul penelitian yang diangkat Kebijakan Pelarangan Media TikTok sebagai Bentuk Sekuritisasi di Amerika Serikat di

Masa Kepemimpinan Donald Trump ini adalah penelitian yang perlu dijelaskan secara terperinci menggunakan kata-kata atau deskriptif sehingga untuk memperjelas isu ini akan sangat tepat untuk menggunakan metode kualitatif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Terdapat empat subjek dalam penelitian proposal ini. Yang pertama adalah pemerintahan Amerika Serikat beserta perusahaan multinasional yang terlibat, dan yang kedua adalah dari pemerintahan Tiongkok dengan perusahaan multinasionalnya yang dikontrol penuh oleh pemerintahannya. Objek yang diteliti adalah keputusan pelarangan teknologi Tiongkok oleh Amerika dengan alasan sekuritisasi

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan pengumpulan data sekunder yaitu data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, website resmi maupun website berita yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam pengerjaan proposal ini terdiri dari pengumpulan data sekunder dengan mencari data-data yang valid dan resmi mengenai isu yang akan dibahas, kemudian mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya, melakukan riset, dan kemudian melakukan analisis serta mendapatkan penjelasan yang jelas dan konkrit sebagai bentuk dari pencapaian.

1.8 Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan isu yang dibahas dalam

proposal penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, kajian pustaka berisi beberapa literatur yang digunakan, landasan teori/konsep/model, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 membahas lebih mendalam mengenai latar belakang TikTok dan alasan TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional, pertumbuhan TikTok di AS, digital literacy di AS serta langkah sekuritisasi terkai Plarangan TikTok AS sesuai dengan terori sekuritisasi menurut Buzan,

Bab 3 menjelaskan mengenai Tiongkok menjadi sebuah ancaman bagi Amerika Serikat terutama dalam sektor politik dan ekonomi, tindakan Oracle sebagai pihak AS dalam menjamin keamanan data pengguna AS dengan menyediakan cloud secure untuk menjamin penyimpanan data pengguna AS, perbedaan kesepakatan antara Oracle dan ByteDance terkait kontrol TikTok, hingga respon dari berbagai pihak terkait pelarangan TikTok baik dari pihak Tiongkok maupun Amerika Serikat.

Bab 4 membahas kesimpulan dari keseluruhan dari penelitian ini.

.

BAB 2
ANALISIS KEBIJAKAN PELARANGAN TIKTOK DALAM UPAYA AMERIKA SEBAGAI BENTUK SEKURITISASI

2.1 TikTok dan Keamanan Nasional

TikTok awalnya bukan merupakan aplikasi yang berdiri sendiri namun merupakan gabungan dan perkembangan dari sebuah aplikasi yang telah popular sebelumnya, yaitu Musical.ly yang diluncurkan pada tahun 2016. Musical.ly diakuisisi oleh Bytedance pada November 2017 dan Tiktok pun diluncurkan. Pada Mei 2018 firma riset pasar Sensor Tower menyatakan TikTok sebagai aplikasi iOS non-game yang paling banyak diunduh dalam 3 bulan pertama di tahun tersebut dan di bulan Agustus 2018 ByteDance menyatakan akan menutup Musical.ly dan akan berpindah ke TikTok (Kelion 2020).

Akun pengguna Musical.ly sebelumnya serta pengikutnya akan secara otomatis pindah ke aplikasi Tiktok. Musical.ly pada awalnya merupakan aplikasi yang sangat popular di kalangan anak muda dengan rentang usia 13-18 tahun. Pengguna Musical.ly yang disebut dengan Musers biasanya membuat konten *lipsync* dan menari yang pada saat itu sangat popular dilakukan (Kusumawardhani and Sari 2021, 22).

Perkembangan TikTok dan Musical.ly setelah menggabungkan kedua aplikasi tersebut dalam satu perusahaan dan menjadi sangat sukses. TikTok resmi diluncurkan pada September 2016 dan menuai banyak atensi dari pengguna individu. Terdapat Tiktok versi Tiongkok bernama Douyin yang mana terdapat 150 juta pengguna aktif dari 500 juta pengguna yang ada (Kusumawardhani and

Sari 2021, 23). Kunci dari kepopuleran aplikasi ini adalah kemudahan dalam penggunaanya dan menyarankan video yang ditampilkan di *home* sesuai dengan video yang sering ditonton dan 'likes' oleh pengguna. Tiktok merupakan aplikasi yang dapat didownload gratis namun terdapat beberapa penjualan virtual seperti iklan, emoji dan stiker.

Kontroversi mengenai Tiktok di AS diasumsikan sebagai salah satu aplikasi yang mana perusahaannya menjadi tangan kanan dari pemerintah Tiongkok sehingga meningkatkan kecurigaan bagi AS apabila perusahaan mengirimkan data pribadi pengguna ke pemerintah sehingga membahayakan privasi pengguna di negara tempat aplikasi tersebut digunakan. Namun Tiktok selalu membantah atas tuduhan tersebut dan menyatakan mereka tidak ada sangkutpautnya dengan pemerintahan Tiongkok. Dapat dilihat dari India menjadi negara yang telah melarang warga negaranya untuk menggunakan TikTok. Terdapat kurang lebih 650 pengguna internet atau sekitar 15% populasi internet dunia di India (Kemp 2021). Dasar dari pemerintahan India yang melarang Tiktok beserta aplikasi buatan Tiongkok lainnya adalah keamanan nasional. The Times of India menyatakan larangan Tiktok diberlakukan dibawah emergency clause UU IT setelah bentrokan yang terjadi antara tentara India dan Tiongkok di perbatasan (TNN 2020).

Pelarangan ini didasari atas kekhawatiran keamanan nasional Amerika Serikat yang akan terancam akibat dari kehadiran aplikasi tersebut, entah hanya bersifat hipotesis, tidak langsung maupun langsung. Aplikasi yang menyediakan berbagai fitur dan konten *short video* tersebut disinyalir sebagai alat bagi pemerintah Tiongkok untuk mengumpulkan dan mencuri data pribadi warga AS

yang kemudian data-data tersebut akan disalurkan ke pemerintah Tiongkok. Ekspansi TikTok di AS memberikan kekhawatiran bagi pemerintahan Donald Trump karena rentannya pencurian data sesuai dengan asumsinya di beberapa wawancara dan konferensi. Kemajuan teknologi Tiongkok ini menjadi sebuah kekhawatiran karena akan merugikan kepentingan nasional dan ketertiban regional AS.

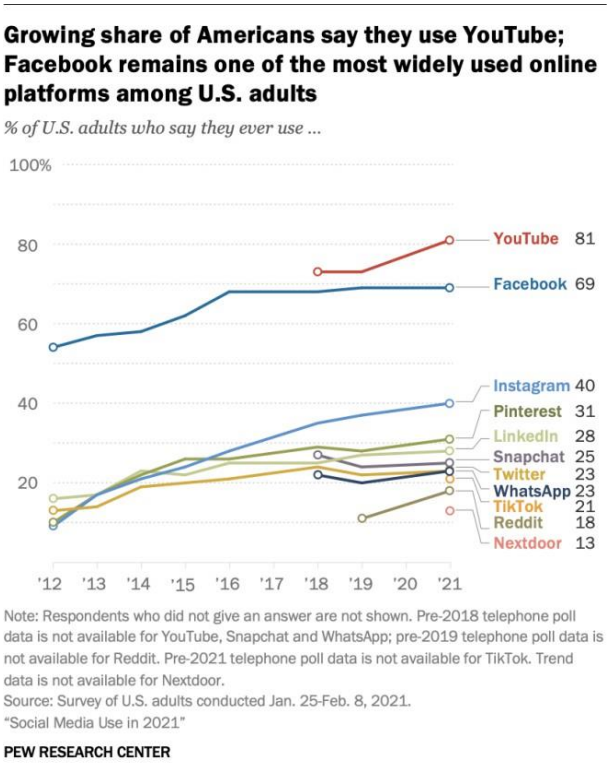
2.2 Pertumbuhan TikTok di Amerika Serikat dan Global

Semenjak Tiktok diluncurkan secara global di tahun 2017, pengguna dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perusahaan TikTok, ByteDance, menyatakan sekitar 55 juta pengguna global terhitung menggunakan Tiktok di bulan Januari 2018 dan angka tersebut semakin meningkat menjadi 271 juta di bulan Desember 2018 dan 507 juta pada Desember 2019. Pada bulan Juli 2020 terdapat 700 juta pengguna aktif Tiktok (Sherman 2020). Bahkan Tiktok menjadi kompetitor aplikasi WhatsApp yang menduduki peringkat kedua sebagai aplikasi dengan jumlah *download* terbanyak dari Apple dan Google. Perusahaan penelitian Sensor Tower memperkiraan TikTok telah didownload sebanyak 165 juta kali (VOA Students Union 2020).

Data terbaru pada akhir September 2021 menyatakan bahwa TikTok telah mencapai 1 miliar pengguna aktif bulanan. Ini menjadikan Tiktok duduk di peringkat ketujuh sebagai aplikasi yang telah digunakan sebanyak miliaran pengguna setelah Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, FB Messenger dan WeChat (Kemp 2021).

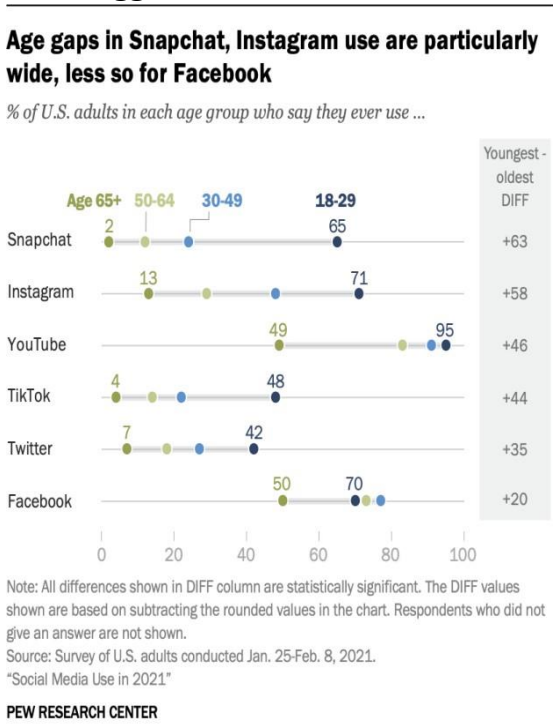
Di Amerika Serikat sendiri, pada Januari 2018, pengguna Tiktok di Amerika mencapai kurang lebih 11 juta, kemudian meningkat di tahun berikutnya yaitu Februari sebesar 27 juta. Kemudian dengan adanya pandemi akibat virus Covid-19 pengguna melonjak menjadi lebih dari 91 juta pengguna (Sherman 2020). Dari survei yang dilakukan oleh situs Pew Research Center, sebanyak 21% orang Amerika menggunakan TikTok. Jumlah ini masih kalah dengan dominasi pengguna media seperti Facebook yang sebesar 69%. Dalam survei ini juga didapatkan data pengguna TikTok sesuai dengan rentang umur sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Survei yang didapatkan dari rentang umur 18-24 mendapatkan hasil bahwa pengguna TikTok mencapai persentase 55% (Auxier and Anderson 2021). Dan pada Agustus 2020, TikTok di Amerika Serikat telah mencapai sebanyak 100 juta pengguna dan 700 juta pengguna aktif global di bulan Juli 2020 (Ahmed 2020).

Gambar 2.2.1
Diagram penggunaan aplikasi oleh masyarakat Amerika Serikat di tahun 2021



Sumber: Pew Research Center (2021)

Gambar 2.2.2
Diagram Jumlah Pengguna Media Sosial di AS berdasarkan Umur

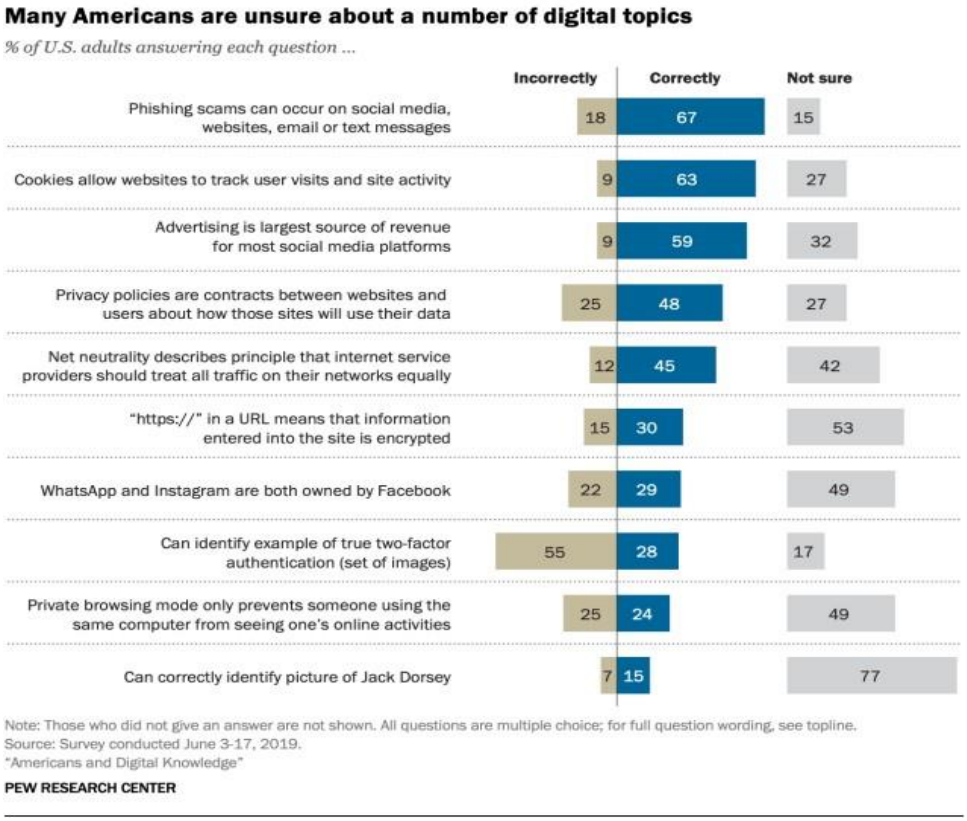


Sumber:Pew Research Center (2021)

2.3 Digital Literacy di Amerika Serikat

Laporan Pew Research Center terbaru menyatakan bahwa *digital literacy* warga Amerika Serikat terhitung sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 40% orang dewasa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar (Anderson and Vogels 2019). Survei yang dilakukan Pew Research Center menemukan pemahaman orang Amerika akan mengenai teknologi sangat beragam tergantung topik. Sementara itu, pengetahuan orang Amerika terkait topik digital sangat bervariasi tergantung dengan tingkat pendidikan dan usia. Terdapat 10 pertanyaan yang diajukan dalam survei yang dilakukan kepada 4.272 orang dewasa yang tinggal di Amerika Serikat pada 3-17 Juni, 2019.

Gambar 2.3.1
Grafik Hasil Survei mengenai 10 pertanyaan mengenai *digital topic*



Sumber: Pew Research Center (2019)

Dari survei yang dilakukan didapatkan data bahwa sebanyak 67% paham mengenai *phising* yang terjadi di berbagai *platform* dan 63% paham bahwa *cookie* adalah file teks yang memungkinkan situs web melacak aktivitas pengguna. Sebanyak 59% mengetahui iklan merupakan sumber terbesar pendapatan dari situs media sosial. Selanjutnya sebanyak 48% orang dewasa dengan benar menjawab jika kebijakan privasi adalah kontrak antara pengguna dengan situs web bagaimana data mereka akan digunakan, sementara yaitu sebesar 45% paham jika *net neutrality* merupakan prinsip bahwa penyedia layanan internet harus memperlakukan pengguna jaringan sama rata. Dalam data juga disebutkan sebanyak 24% mengetahui apabila "*private browsing*" atau "*incognito mode*" hanya menyembunyikan aktivitas online pengguna dari orang lain yang menggunakan perangkat yang sama (Anderson and Vogels 2019).

2.4 Langkah Sekuritisasi menurut Teori Sekuritisasi dalam Pelarangan TikTok di AS

Sekuritisasi memiliki dasar yakni dari *speech act*, asumsi yang berasal dari pendekatan tradisional dan pendekatan Schmittian terkait keamanan dan politik. Perhatian AS terhadap internet menjadi bagian dari kekhawatiran AS dalam keamanan nasional telah ada sejak masa pemerintahan Bill Clinton di tahun 1990-an yang mana administrasi Bill Clinton telah memprediksi hal tersebut. Dan kekhawatiran tersebut menjadi lebih intens di masa pemerintahan Donald Trump. Lewat berbagai *speech act*-nya bersama Mike Pompeo pada Juli-Agustus 2020 yang menyatakan TikTok akan dilarang di AS karena TikTok merupakan ancaman keamanan bagi keamanan nasional Amerika Serikat terutama pencurian

data pribadi. Diperkuat dengan pernyataan John Hawley dan Rick Scott jika TikTok memiliki hubungan dengan Partai Komunis China yang beresiko mengancam keamanan nasional dan mata-mata. John Hawley menyatakan TikTok yang dimiliki oleh perusahan Tiongkok melibatkan PKC dalam kursi dewan dan diwajibkan bagi perusahaan untuk membagikan data secara hukum kepada Beijing (Collins 2020).

Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai suatu permasalahan atau isu yang subjektif karena dalam teori sekuritisasi yang dinyatakan oleh *Copenhagen School* ialah ancaman bagi keamanan tidak harus karena adanya ancaman yang nyata atau eksistensial yang nyata, namun karena dipaparkan atau dinyatakan oleh agen kunci—yaitu pemerintah dan dikonstruksi secara sosial sebagai sebuah ancaman, maka dapat dikatakan bahwa tindakan *speech act* pelarangan TikTok ini merupakan langkah pertama dan utama dalam tindakan sekuritisasi.

Seorang aktor harus melakukan sebuah aksi yang menyatakan secara resmi bahwa isu tersebut merupakan sebuah ancaman sekuritsasi, sehingga *speech act* yang dilakukan oleh aktor utama harus memenuhi 3 kriteria, yaitu

1. Objek referensi secara eksistensial terancam
2. Menuntut hak untuk melakukan tindakan darurat
3. Aktor utama meyakinkan audiens untuk memvalidasi tindakan darurat tersebut—yang mana aturan standar di luar atau perilaku melanggar aturan untuk melawan ancaman itu dibenarkan (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 168-169).

Sementara itu . Buzan menyatakan terdapat 3 langkah sekuritisasi yang berhasil dalam mencegah sebuah masalah sekuritisasi, yaitu

1. mengidentifikasi masalah atau ancaman eksistensial:
2. tindakan/respon darurat; dan
3. pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit yang terlibat dengan melanggar aturan (Wilde et al. 1998, 26).

Singkatnya, Buzan menyatakan bahwa secara tradisional, dengan menyatakan 'keamanan', seorang perwakilan negara menyatakan sebuah keadaan darurat, dengan demikian ia dapat menuntut hak untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk memblokir perkembangan yang mengancam (William 2011).

Tindakan AS dapat dipahami sebagai bentuk sekuritisasi dikarenakan saat ini *networking*, internet dan *cyberspace* telah berkembang sangat maju terutama dalam bidang komunikasi dan *e-commerce*. Dan kedua hal tersebut tergolong dalam "infrastruktur kritis". Infrastruktur kritis adalah beberapa sektor dasar yang penting dan krusial bagi sebuah negara untuk berdiri di peradaban modern, seperti pertanian, distribusi makanan, perbankan, perawatan kesehatan, transportasi, air, dan jaringan listrik (Singer and Friedman 2014, 15).

Dengan adanya TikTok ini, memberikan urgensi kepada AS dan menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi. Karena dalam praktik dalam masalah keamanan–tidak harus karena ancaman eksistensial yang nyata namun karena masalah tersebut dinyatakan sebagai ancaman (Wilde et al. 1998, 24). Sekuritsasi pun memberikan pandangan baru: kelompok yang melihat ancaman itu merupakan hal yang subjektif (ancaman nyata), dan kelompok lainnya yang melihat ancaman itu secara objektif (ancaman yang dirasakan) (Wilde et all 1998, 30).

Aktor yang mengidentifikasikan sebuah isu menjadi sebuah isu keamanan disebut *securitizing actors* yang didefinisikan sebagai "seseorang yang mengamankan masalah dengan menyatakan—objek referensi—terancam secara eksistensial." (Ross 2014). Dalam hal ini objek eksistensial merupakan negara atau masyarakat, yakni AS dan warga AS. Tindakan sekuritisasi yang dilakukan Trump dapat diuraikan dalam tabel 3.1..

Tabel 2.4.1
Proses Sekuritisasi Pelarangan TikTok di AS menurut Teori Sekuritisasi

mengidentifikasi masalah atau ancaman eksistensial	tindakan/respon darurat	pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit
•Juli 2020: Sekretaris Negara Mike Pompeo bersama Presiden Trump mengatakan di media bahwa TikTok kemungkinan akan dilarang dari Amerika Serikat •6 Agustus 2020: : Lewat website White House, Presiden Tump mengeluarkan Perintah Ekslusif dan menyatakan bahwa TikTok merupakan ancaman keamanan nasional dan akan melarang berbagai transaski TikTok dengan batas waktu 45 hari	•Agustus 2020: Microsoft dan Oracle mulai melakukan pendekatan dan persaingan untuk mengakuisisi atau mengoperasikan TikTok di AS •6 Agustus 2020: : Lewat website White House, Presiden Tump mengeluarkan Perintah Eksklusif dan menyatakan bahwa TikTok merupakan ancaman keamanan nasional dan akan melarang berbagai transaksi TikTok dengan batas waktu 45 hari	•24 Agustus 2020: TikTok mengajukan keluhan akan ancaman pemblokiran TikTok ke pengadilan federal yang menantang upaya Adminitrasi untuk melarang TikTok di AS •13 September 2020: Dalam website resmi Microsoft, mereka menyatakan bahwa ByteDance memberi tahu jika mereka tidak akan menjual operasi TikTok AS ke Microsoft •19 September 2020: Website resmi Oracle menyatakan bahwa mereka terpilih menjadi penyedia Cloud Aman untuk Tiktok •21-22 September 2020: Ada perbedaan pandangan terhadap kesepakatan yang ada sehingga menimbulkan perselisihan dan kendala dalam melakukan persetujuan

Poin pertama, mengindentifikasi masalah sebagai ancaman keamanan. Trump menyatakan dalam berbagai wawancara dan konferensi bahwa Tiktok menjadi sebuah sumber kekhawatiran atas ancaman keamanan nasional dan mengancam data pribadi warga AS yang diasumsikan dapat diakses oleh Pemerintahan Tiongkok dibawah perjanjian antara perusahaan dan pemerintah.

Sebelumnya pada Pada tanggal 5 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan program *Clean Network Program* yang bertujuan untuk menjalankan gerakan anti-China untuk menyingkirkan dominasi teknologi Tiongkok dari AS. Dengan program ini, akan dilakukan pencabutan seluruh operator telekomunikasi Tiongkok, layanan *cloud*, aplikasi, toko aplikasi hingga kabel bawah laut. Kebijakan ini memberikan jalan yang lebih luas kepada inisiatif *Clean Path Program* 5G Gedung Putih untuk melarang perusahaan perangkat keras Tiongkok seperti Huawei dan ZTE serta tidak dapat beroperasi lagi dalam infrastruktur telekomunikasi AS (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 173). Semua upaya ini dilakukan dengan maksud untuk "menjaga privasi warga AS dan informasi paling sensitif dari gangguan agresif oleh aktor lawan seperti Partai Komunis Tiongkok (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 173).

Hingga pada tanggal 6 Agustus di website trumpwhitehouse.com, Trump mengeluarkan *emergency economic powers* atau *executive order* yang mengambil langkah-langkah tambahan untuk menangani keadaan darurat nasional sehubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan rantai pasokan layanan yang dinyatakan dalam Perintah Eksklusif 13873 yang tertanggal 15 Mei 2019. Pernyataan Trump untuk melakukan pelarangan TikTok dan mengeluarkan Perintah Eksekutif pun tak hanya sembarangan namun berdasarkan *International Emergency Economic Powers Act* (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), *National Emergencies Act* (50 USC 1601 et seq.), dan bagian 301 dari judul 3, *United States Code* sebagai bentuk tindakan kewaspadaan akan pencurian data yang diasumsi dilakukan oleh TikTok dan memungkinkan Partai Komunis China untuk mengakses informasi pribadi dan hak milik AS—berpotensi melacak lokasi

karyawan dan kontraktor Federal, membuat berkas pribadi untuk pemerasan, dan melakukan spionase perusahaan (The White House 2020). Tindakan ini dilakukan sehubungan dengan adanya menjamurnya aplikasi *mobile* yang dikembangkan oleh Tiongkok di Amerika Serikat yang akan mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat. Dan aplikasi yang dimaksud adalah TikTok (The White House 2020). Trump menyatakan:

> *"TikTok automatically captures vast swaths of information from its users, including Internet and other network activity information such as location data and browsing and search histories. This data collection threatens to allow the Chinese Communist Party access to Americans' personal and proprietary information — potentially allowing China to track the locations of Federal employees and contractors, build dossiers of personal information for blackmail, and conduct corporate espionage."* (The White House 2020).

Trump juga menyatakan bahwa TikTok ini akan mengancam keamanan. Kebijakan luar negeri dan ekonomi AS;

> *"Specifically, the spread in the United States of mobile applications developed and owned by companies in the People's Republic of China (China) continues to threaten the national security, foreign policy, and economy of the United States. At this time, action must be taken to address the threat posed by one mobile application in particular, TikTok."* (The White House 2020).

Beberapa petinggi, politikus, dan lain sebagainya selain presiden AS, Donald Trump menyampaikan kekhawatiran TikTok yang semakin populer digunakan. Kasus yang cukup unik dimana perusahaan disini bukan menjadi aktor utama yang perlu dihadapi oleh ByteDance untuk bersaing dan melakukan ekspansi, namun pemerintah AS. Dikutip dari CNN Business, petinggi seperti pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer dan Senator Republik Arkansas Tom Cotton menghimbau komunitas intelijen untuk mengukur dan menilai resiko dan

kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh meluasnya TikTok di AS terhadap keamanan nasional. Namun seluruh pernyataan dan tuduhan tersebut dianggap sebagai "tuduhan tidak berdasar". Dan untuk menyatakan bahwa mereka merupakan perusahaan yang terindependensi dari Tiongkok dan mengutip CEO Amerika yang telah direkrut sebelumnya dan menyatakan bahwa mereka "tidak pernah memberikan data pengguna (pengguna AS) ke pemerintah Tiongkok, dan tidak akan melakukan hal tersebut apabila diminta" (Fung 2020).

Poin kedua, melakukan tindakan/respon darurat. Dengan adanya pelarangan TikTok di AS dan dianggap sebagai ancaman nyata, terdapat beberapa cabang militer AS dan lembaga termasuk Administrasi Keamanan Transportasi dan Angkatan Darat AS telah melarang personel mereka untuk menggunakan TikTok (Finnegan, Thorbecke, and Yiu 2020). Departemen Keamanan Dalam Negeri, Administrasi Keamanan Transportasi dan Angkatan Bersenjata AS melarang penggunaan TikTok di telepon Pemerintahan Federal. Dalam pernyataan pers oleh Senator John Hawley yang berasal dari Missouri dari partai Republik selaku sponsor RUU, menyatakan bahwa Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat dengan suara bulat mengesahkan UU yang akan melarang pekerja federal AS untuk mengunduh aplikasi TikTok ke perangkat pemerintahan AS (Bartz 2021).

Perusahaan dan organisasi Amerika pun mulai melarang penggunaan TikTok di perangkat mereka. Hal ini telah disampaikan oleh Trump dalam pidatonya yang dinaskahkan dipublikasi di website White House:

> *"These risks are real. The Department of Homeland Security, Transportation Security Administration, and the United States Armed Forces have already banned the use of TikTok on Federal Government phones…"*

> *"American companies and organizations have begun banning TikTok on their devices. The United States must take aggressive action against the owners of TikTok to protect our national security."* (The White House 2020).

Tidak hanya itu, Trump menyatakan berbagai transaksi yang dilakukan oleh ByteDance akan dilarang selama 45 hari dan dalam 45 itu juga Sekretaris Perdagangan harus mengidentifikasi transaksi yang ada:

> *Section 1. (a) The following actions shall be prohibited beginning 45 days after the date of this order, to the extent permitted under applicable law: any transaction by any person, or with respect to any property, subject to the jurisdiction of the United States, with ByteDance Ltd. (a.k.a. Zìjié Tiàodòng), Beijing, China, or its subsidiaries, in which any such company has any interest, as identified by the Secretary of Commerce (Secretary) under section 1(c) of this order.*
>
> *(b) The prohibition in subsection (a) of this section applies except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted before the date of this order.*
>
> *(c) 45 days after the date of this order, the Secretary shall identify the transactions subject to subsection (a) of this section.* (The White House 2020).

Poin ketiga, pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit yang terlibat dengan melanggar aturan. Tindakan pemblokiran ini menjadi sebuah langkah yang dapat melanggar aturan karena menghalangi pengguna TikTok di AS dalam kebebasan berpendapat atau *right of speech* karena media TikTok dinilai sangat ampuh. Contohnya dalam peristiwa *#BlackLivesMatter* dan kejadian kegagalan *rally campaign Trump* di Tulsa, Oklahoma. Tidak hanya itu, Tiongkok sendiri dicap tidak etis dan perencanaan industrinya dipimpin oleh pemerintah yang menegakkan transfer teknologi. Tuduhan lainnya adalah

Tiongkok telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung rezim otoriternya dan bahwa kemajuan Tiongkok dalam sains dan teknologi akan merugikan kepentingan nasional dan ketertiban regional AS (Hayoung 2019, 2). Tindakan pencurian data dan kontrol teknologi yang diasumsikan dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok dapat dikatakan merupakan pelanggaran aturan akan privasi negara.

Tidak hanya itu, TikTok menilai Perintah Eksklusif yang dikeluarkan Administrasi di bawah *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA), tidak mengikuti proses hukum dan gagal memberikan bukti nyata bahwa TikTok merupakan ancaman nyata atau pembenaran atas tindakan hukumannya.yang menuduh TikTok sebagai ancaman keamanan nasional. Pernyataan dan tindakan akan memblokir Tiktok ini juga telah melanggar perlindungan proses hukum Amandemen Kelima.

TikTok pun mengeluarkan respon mereka pada tanggal 24 Agustus 2020. Mereka menyatakan sangat tidak setuju akan tuduhan tersebut yang dapat mencabut hak-hak komunitas. Mereka membantah tuduhan tersebut bahwa TikTok merupakan ancaman keamanan nasional dan menyatakan keberatan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kepercayaan pengguna AS dengan mengambil tindakan luar biasa yang telah diketahui oleh pemerintah AS yakni penyimpanan data disimpan di luar Tiongkok (di Amerika Serikat dan Singapura) dan membangun penghalang perangkat lunak yang membantu TikTok menyimpan data secara terpisah dari data pengguna produk ByteDance lainnya demi menjamin dalam perlindungan privasi dan keamanan pengguna TikTok AS, Tidak hanya itu, personil utama

yang bertanggung jawab untuk melayani pasar TikTok termasuk CEO, Kepala Keamanan Global, dan Penasihat Umum, keseluruhannya adalah orang Amerika yang berbasis di AS dan tidak tunduk kepada hukum Tiongkok. Moderasi konten AS pun dipimpin oleh perusahaan yang berbasis di AS, tim beroperasi secara independen dan server pun terpisah dari Tiongkok—yang mana berlokasi di AS dan Singapura (TikTok Company 2020).

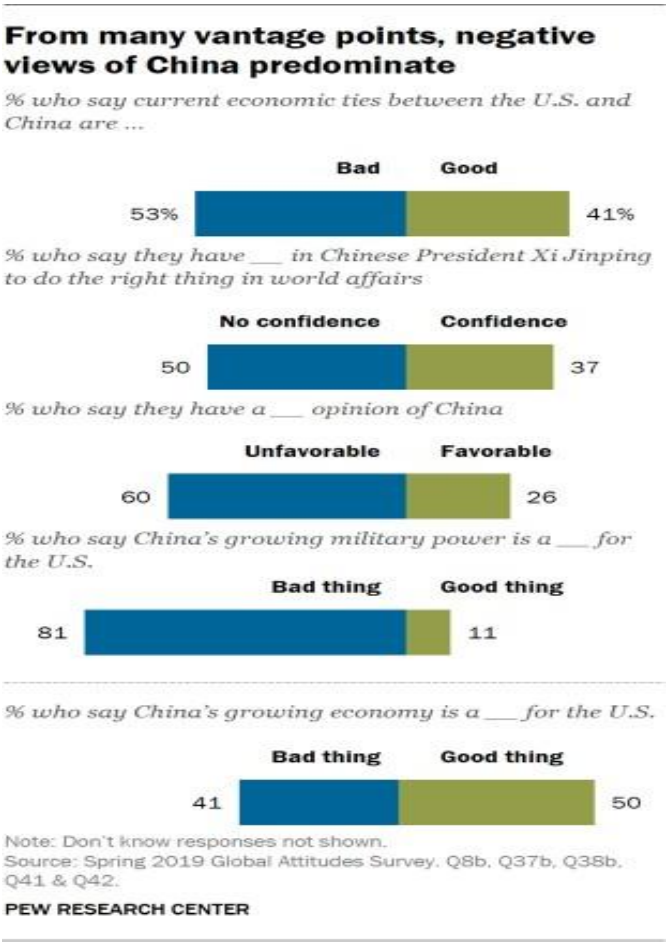
Tidak hanya itu, dilanjutkan dalam pernyataan TikTok tersebut juga dikatakan di tahun 2019, CFIUS (*The Committee on Foreign Investment in the United States*) melakukan tinjauan kegiatan akuisisi ByteDance dengan Musical.ly meskipun Musical.ly yang berbasis di Tiongkok memiliki aset yang terbatas di AS. Tinjauan ini dirasa agak janggal karena ByteDance telah melakukan akuisisi terhadap Musical.ly di tahun 2017 dan ByteDance telah meninggalkan sebagian besar aset terbatas Musical.ly di AS pada saat penjangkauan CFIUS di tahun 2019. Dalam peninjauan tersebut, ByteDance memberikan banyak dokumentasi dan informasi sebagai tanggapan atas pertanyaan dari CFIUS. Tidak hanya itu, ByteDance pun mengirimkan dokumen terperinci perihal langkah-langkah keamanan TikTok untuk memastikan data pengguna AS dilindungi dalam penyimpanan dan tidak dapat diakses oleh pihak manapun, khususnya di luar Amerika Serikat. CFIUS juga tidak mengklarifikasi apapun mengapa tindakan keamanan TikTok tidak memenuhi untuk mengatasi masalah keamanan nasional. Namun upaya-upaya tersebut dirasa diabaikan dan pada tanggal 30 Juli 2020, Komite mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa CFIUS mengidentifikasi adanya risiko keamanan nasional yang timbul dari transaksi dan belum

mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut (TikTok Company 2020).

Dalam kasus pelarangan TikTok sendiri, terdapat kekhawatiran bahwa pelarangan nanti akan mempengaruhi gaji karyawan yang bekerja di TikTok yang tentu akan melarang hak mereka terkait kesejahteraan pekerja. Hal ini berawal dari pengajuan di Pengadilan Distrik California Utara bahwa mereka telah mengirimkan jaminan kepada Patrick Ryan, penggugat dalam gugatan, bahwa perintah yang dilayangkan Trump dalam pelarangan TikTok tidak bermaksud untuk mempengaruhi gaji hingga tunjangan karyawan. Dalam pengajuan dikatakan Departemen Perdagangan menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk menerapkan Perintah Eksklusif 13942 dengan melarang pembayaran upah dan/atau gaji kepada penggugat atau karyawan atau kontraktor lainnya (Musil 2020).

Terkait poin ketiga dalam kunci *speech act*. aktor utama meyakinkan audiens—yaitu masyarakat untuk meyakini bahwa pernyataan aktor utama bahwa permasalahan yang diyakini sebagai isu sekuritisasi dan mengancam keamanan adalah benar. Menurut *polling* yang dilakukan oleh Pew Research Center di tahun 2020, sebesar 60% dari populasi AS memiliki pandangan buruk terhadap Tiongkok dan angka persentase naik sebesar 14 persen dari polling sebelumnya yaitu 47% persen di tahun 2018. Disebutkan juga dalam report bahwa sebesar 24% atau seperempat warga Amerika memandang Tiongkok sebagai ancaman yang mengancam AS di masa depan, 2 kali lipat dari persentase di tahun 2007 (Devin, Huang, and Silver 2019).

Gambar 2.4.2
Persentase Pandangan Amerika terhadap Tiongkok



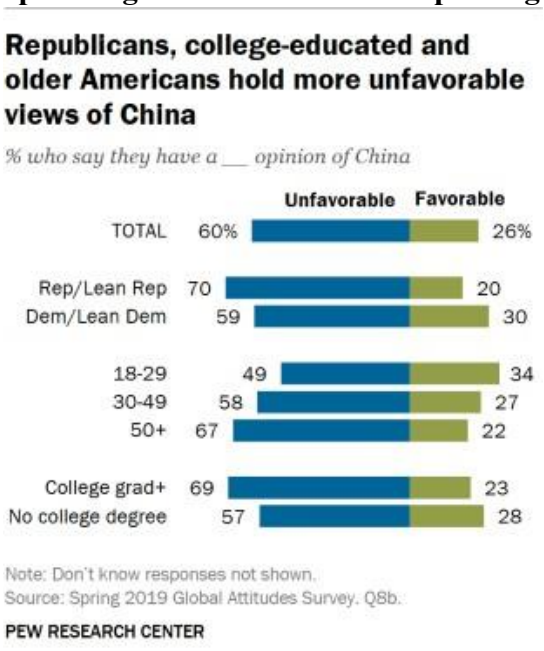
Sumber: Pew Research Center (2019)

Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Tiongkok dipandang baik dibanding buruk (53% berbanding 41%). Namun untuk bidang militer sendiri, persentase berbanding terbalik sangat tinggi dimana warga Amerika memandang pertumbuhan militer Tiongkok menjadi sebuah hal yang buruk bagi AS (81% banding 11%). Dalam penelitian Pew Research Center yang dilakukan dari 13 Mei hingga 18 Juni 2019, diantara 1.503 orang dewasa, orang Amerika yang lebih tua cenderung memiliki pandangan yang lebih negatif tentang Tiongkok dibanding orang Amerika yang lebih muda (Devin, Huang, and Silver 2019). Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah bukti bahwa banyak anak muda yang menentang adanya

kebijakan pelarangan TikTok namun orang Amerika yang lebih tua justru memandang aplikasi dari Tiongkok tersebut menjadi sebuah ancaman bagi AS.

Sekitar setengah dari anak berusia 18 hingga 29 tahun sebesar 49% menyatakan memiliki pandangan buruk tentang Tiongkok, berbanding dengan mereka yang berusia 30 hingga 49 tahun dengan persentase 58% dan dua pertiga orang berusia 50 tahun keatas sebesar 67%. Sebesar 69% orang dengan gelar sarjana memiliki pandangan buruk terhadap Tiongkok dibanding mereka yang belum menyelesaikan kuliah yang memiliki persentase 57% (Devin, Huang, and Silver 2019)

Gambar. 2.4.3
Persentase *College-Educated* dan orang Amerika yang lebih tua yang memiliki pandangan tidak baik terhadap Tiongkok.

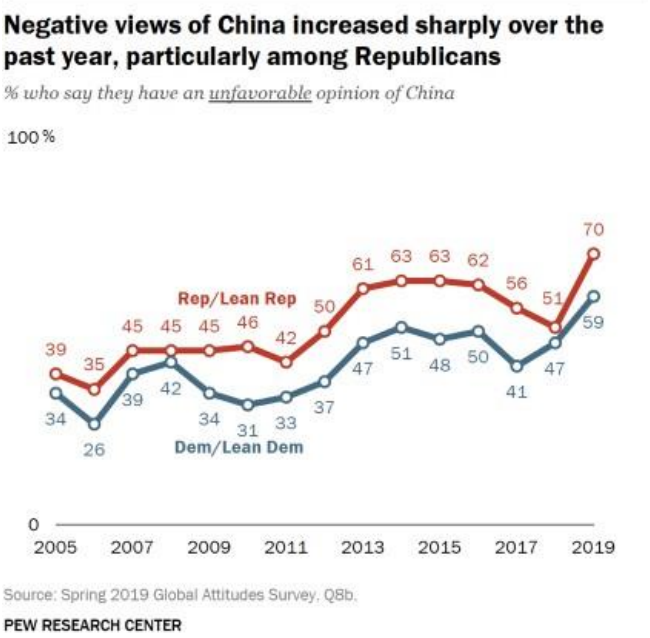


Sumber: Pew Research Center (2019)

Sebanyak tujuh dari 10 pendukung Partai Republik dan Republik memiliki pandangan tidak baik terhadap Tiongkok, naik 51% di tahun 2018 dari melonjak ke angka 70% di tahun 2019. Sementara itu untuk Partai Demokrat dan

pendukung Demokrat, pendapat yang tidak baik terhadap Tiongkok meningkat tidak begitu besar dengan periode yang sama, dari 47% ke 59%. Hal ini dapat menjadi faktor yang cukup kuat dalam pemerintahan Trump banyak sekali pemblokiran dan pelarangan kerjasama serta masuknya produk Tiongkok ke AS.

Gambar 2.4.4
Persentase Kenaikan Pandangan Buruk Kedua Partai (Republikan dan Demokrat) di AS terhadap Tiongkok



Sumber: Pew Research Center (2019)

BAB 3
KONTEKS POLITIK DOMESTIK DAN INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN PELARANGAN TIKTOK DALAM SEKURITISASI

3.1 Tiongkok sebagai Ancaman bagi Amerika Serikat

Dalam lingkup isu keamanan, Buzan mengelompokkan dalam 5 sektor yang tiap sektornya mengidentifikasi interaksi yang ada, yakni (Wilde et al. 1998, 7-8):

a. Sektor politik (status pemerintahan, pengakuan, ototritas)

b. Sektor ekonomi (finansial, perdagangan, dan produksi)

c. Sektor lingkungan (aktifitas manusia dan the planetary biosphere)

d. Sektor militer (*forceful coercion*)

e. Sektor sosial (*collective identity*)

Dalam isu ini, terdapat sektor politik dan ekonomi dalam kacamata sekuritisasi. Menurut Buzan sendiri dalam menetapkan sektor-sektor dalam analisis keamanan terdapat salah satunya ekonomi dan politik yang menyatakan bahwa **keamanan ekonomi** adalah kekhawatiran akan akses ke sumber daya, keuangan dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang dapat diterima serta **keamanan politik** adalah kekhawatiran akan stabilitas organisasi negara, sistem pemerintahan dan ideologi yang memberi mereka legitimasi (Wilde et al. 1998, 8).

Peperangan teknologi antara AS dan Tiongkok ini didasari dengan adanya perbedaan nilai politik, persaingan ekonomi, persaingan di wilayah regional maupun global hingga permasalahan geopolitik. Konflik geo-politik dan perebutan kekuasaan di era globalisasi sangat berkaitan dengan perusahaan internet. Dimensi ekonomi, budaya, ideologi dan politik kerap kali cenderung

melibatkan industri ekonomi digital secara simultan (Huang, Huang, and Miao 2021, 5). Kompetisi dalam *cyberspace*, bagaimanapun dibatasi oleh dua elemen, yakni ekonomi dan politik (Segal 2013, 40).

Yang pertama adalah politik. Keinginan Tiongkok untuk menjadi sebuah negara *cyber hegemon* dilandasi dengan ide *Four Modernization* yang mana terdapat empat sektor ambisi Tiongkok dalam kemajuan negaranya yaitu dalam sektor Industri, Agrikultur, Pertahanan, dan Teknologi. Ide tersebut diinisasi secara tidak langsung oleh Deng Xiaoping. Keempat sektor tersebut menjadi fokus utama bagi Tiongkok untuk dapat berkompetisi di lingkup internasional. Untuk Amerika sendiri, *Grand Strategy* menjadi dasar atas strategi yang digunakan oleh presiden-presiden yang pernah memerintah. *Grand Strategy* merupakan sekumpulan kebijakan dari hasil preferensi dan formulasi yang dikeluarkan oleh presiden Amerika Serikat, sesuai dengan Pasal II Konstitusi dimana Presiden memiliki kapabilitas penuh untuk memimpin dan merancang kebijakan yang tepat untuk negara.

Grand Strategy dalam praktiknya seringkali didapatkan perbedaan dikarenakan di setiap presiden memiliki latar belakang individual hingga keadaan domestik dan luar negeri yang dialami saat presiden tersebut memimpin. Perubahan dinamika dan struktur global akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan kebijakan luar negeri. Rosenau (1974) menjelaskan perubahan internal, perubahan eksternal dan faktor kepemimpinan merupakan gabungan dari akar perumusan model kebijakan luar negeri adaptif (Arisanto and Wibawa 2021, 167).

Hubungan antara Amerika-Tiongkok tidak sepenuhnya ramah, termasuk dengan kebijakan yang diambil sehingga Amerika perlu mencari cara agar dapat mencapai kepentingannya. Terdapat empat sumbu konflik dalam konflik perpecahan domestik yang mendasari dan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri AS pada era pasca Perang Dingin, yaitu

1. Kelembagaan (Eksekutif vs Kongres)
2. Ideologis (contohnya, liberal vs konservatif)
3. Partisan (Partai Republik vs Demokrat)
4. Komersial (contohnya, kepentingan bisnis internasionalis vs kepentingan bisnis nasionalis) (Gates and Skidmore 1997, 515).

Di masa pemerintahan Obama, hubungan dengan Tiongkok mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Terdapat kebijakan *Pivot to Asia* yang mana Presiden Obama melakukan alokasi sumber daya di berbagai sektor seperti militer, ekonomi hingga politik di kawasan Asia-Pasifik. Dari berbagai kebijakan yang dilakukan, salah satunya adalah dengan mengerahkan sumber diplomasi untuk membangun kerangka perdagangan bebas baru melalui *Trans-Pacific Partnership* (Wardhana 2018, 70). Kebijakan *Pivot to Asia* ini dapat dikatakan sebagai usaha Amerika Serikat untuk kembali menarik kepercayaan dan mendominasi kembali di kawasan Asia dan Pasifik dengan berbagai perjanjian yang dibuat. Tidak hanya itu, kebijakan ini pun bertujuan untuk mengurangi pengaruh Tiongkok dan secara tidak langsung mencoba untuk menolak dominasi Cina serta menunjukkan kekuatan baru di berbagai sektor oleh Amerika dengan *Grand Strategy* baru yang dimiliki. Dikarenakan di pemerintahan sebelumnya kebijakan luar negeri lebih berfokus kepada *hard power*, strategi *Pivot to Asia* ini

menjadi penyeimbang terhadap fokus AS yang berat sebelah saat *War on Terror* di masa George W. Bush yang mana pergantian fokus ini awalnya dari perlawanan terorisme yang berkepanjangan ke arah isu struktural terkait ekonomi serta perwujudan tatanan internasional yang berfokus pada kawasan Asia-Pasifik (Wardhana 2018, 70-71).

Sementara itu di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cepat memberikan kekhawatiran bagi Amerika karena dalam beberapa tahun kedepan diprediksi Tiongkok akan memimpin ekonomi dunia. Amerika Serikat sendiri menjadi negara nomor dua setelah Tiongkok sebagai negara dengan pasar ekspor terbesar, sementara Tiongkok sendiri menjadi negara nomor 3 di AS, dan investasi dua arah yang dilakukan apabila ditotalkan lebih dari $55 miliar di tahun 2012 (Segal 2013, 40).

Penyebab utama terjadinya perang teknologi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump kepada Tiongkok dikarenakan oleh beberapa faktor yakni perbedaan nilai yang dimiliki oleh antara Tiongkok dan AS yakni dalam nilai-nilai politik, pengejaran geopolitik hingga persaingan mereka di arena regional dan global (Hayoung 2019, 2). Di masa pemerintahan Presiden Barack Obama, mereka berusaha mencegah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok di industri semikonduktor Amerika. Karena hal tersebut, AS secara bertahap memperketat akses Tiongkok ke teknologi AS. Dan dibawah pemerintahan Donald Trump, sekuritisasi persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok secara resmi terlibat (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 170).

Sebelumnya ZTE Corporation dilarang melakukan transaksi dengan perusahaan yang ada di AS karena adanya keterlibatan ZTE dalam hal teknologi

dengan Iran dan Korea Utara. Karena hal tersebut, ZTE menyatakan bersalah dan membayar denda sebesar $1 miliar dan memberikan izin kepada komite khusus AS untuk mengawasi agar dapat memastikan bahwa ZTE tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut, Pemerintahan Trump mencabut kebijakan pelarangan ZTE di AS dan memberikan kesempatan untuk tetap melakukan bisnis dengan perusahaan Amerika (Stolyar and de Looper 2018).

Pada Desember 2018, atas permintaan AS, terjadi penahanan Meng Wanzhou selaku CEO dari Huawei dengan tuduhan bahwa Huawei melakukan penjualan secara ilegal terhadap teknologi AS ke Iran (Musil 2018), yang kemudian Pengadilan Kanada di Vancouver, British Columbia, memutuskan bahwa Wangzhou memenuhi syarat untuk proses ekstradisi ke AS (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 161).

Dan pada tanggal 15 Mei 2019 Menteri Perdagangan diberikan mandat oleh Donald Trump lewat penandatanganan Perintah Eksklusif yang menyatakan bahwa Menteri Perdagangan Luar Negeri AS dapat menentukan potensi akan keamanan nasional dan perdagangan luar negeri AS dan memblokir transaksi risiko keamanan nasional yang tinggi (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 160).

Huawei yang menjadi salah satu perusahaan teknologi besar di Tiongkok tidak luput dari pelarangan di AS di masa Donald Trump. AS menyatakan bahwa Huawei merupakan perusahaan yang berada dibawah militer Tiongkok dan memiliki infrastruktur jaringan yang digunakan untuk melakukan spionase siber (Reichert 2020). Dengan adanya tuduhan ini, Donald Trump melarang perusahaan AS untuk menggunakan produk buatan Huawei dan begitu pula sebaliknya, Huawei dilarang menggunakan produk dan teknologi buatan AS.

Dengan adanya kebijakan ini. Selain melemahkan dominasi sektor bisnis telekomunikasi Huawei namun juga posisi mereka dalam pasar *smartphone* karena mereka juga memiliki kerjasama dengan tiga perusahaan besar teknologi dalam perangkat *mobile* AS yaitu Google, Arm, dan Qualcomm (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 161). Dan hal tersebut semakin memburuk setelah administrasi Trump memperpanjang *executive bill* hingga tanggal 23 Mei 2021 (Heater 2020).

Dalam kasus Huawei, Huawei menjadi produk yang masuk ke dalam daftar *blacklist* pasar AS dan oleh sebab itu partner dagang Huawei yang ada di AS harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke Departemen Perdagangan AS agar hubungan bisnis dapat dilakukan. Walau Huawei merupakan perusahaan swasta, namun dicurigai memiliki hubungan dengan perusahaan Tiongkok. Perusahaan seperti Google pun tidak memberikan akses aplikasinya seperti Gmail dan Google Maps di *smartphone* Huawei. Tidak hanya itu, perusahaan seperti Intel, Broadcom dan Qualcomm tidak akan memasok barang mereka ke Huawei. Tindakan ini diambil sebagai respon atas konflik perang dagang dengan Tiongkok serta kekhawatiran atas pemerintah Tiongkok yang menggunakan Huawei sebagai alat untuk memata-matai AS dikarenakan adanya spekulasi perusahaan teknologi Tiongkok memiliki hubungan dengan dinas intelinjen dan pemerintahnya.

Hal tersebut diperkuat dengan lingkungan politik dan hukum di Tiongkok yang sudah tidak asing lagi apabila sebuah perusahaan memerlukan kerjasama dengan pemerintah agar dapat berjalan lancar di perdagangan global. Kapasitas teknologi 5G yang menjadi bukti kemajuan perusahaan Tiongkok yang diaplikasikan ke Huawei dikhawatirkan akan memberikan ketergantungan kepada pengguna di AS dan berpotensi akan dikendalikan oleh dinas intelijen dan militer

Tiongkok. Larangan Huawei ditanggapi oleh pendiri Huawei, Ren Zhengei yang menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan sistem operasinya sendiri jika kehilangan akses ke Android. Ia juga menyatakan perusahaan telah mengantisipasi kemungkinan kehilangan akses ke perusahaan Amerika (Hosain 2019, 22).

Amerika Serikat sendiri dikenal sebagai raksasa digital dikarenakan banyak sekali perusahaan teknologi maupun aplikasi sosial media yang saat ini digunakan yang kebanyakan berasal dari Amerika. Contohnya Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, hingga Facebook yang saat ini telah berubah namanya menjadi Meta. Dalam Fox Business terdapat 4 dari 5 perusahaan media sosial asal Amerika yang diperdagangkan secara publik untuk mengetahui pendapatan masing-masing di tahun 2019. Dimulai dari Pinterest yang menghasilkan lebih dari $1,14 miliar pada tahun 2019 dan berencana akan meningkatkan pendapatan tahunannya menjadi $1, 52 miliar di tahun 2020. Kemudian Snapchat dengan pendapatan lebih dari $1,7 miliar dengan peningkatan pengguna aktif harian sebesar 17 persen di setiap tahunnya menjadi 218 juta. Twitter yang sangat popular digunakan menghasilkan pendapatan $3, 46 miliar dengan adanya peningkatan 14 persen dari tahun ke tahun menurut hasil 2019. Dan yang terakhir adalah Facebook dengan pendapatan lebih dari $70, 69 miliar di tahun 2019 yang mencakup uang dari iklan dan operasi bisnis lainnya (Moore 2019).

3.2 Tindakan Penyediaan *Cloud Secure* dan Pembelian Saham oleh Oracle

Sebuah opsi diberikan oleh Trump apabila Tiktok tetap ingin beroperasi di AS. Trump menyatakan akan memberikan izin kepada perusahaan AS manapun untuk membeli saham Tiktok sebagian maupun seluruhnya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hingga pada bulan September terdapat dua perusahaan yang ingin melakukan kerjasama dengan ByteDance yakni Microsoft dan Oracle untuk menghindari pelarangan TikTok. Dengan adanya pembelian saham dari Oracle, penggunaan *cloud* milik Oracle untuk menyimpan data, campur tangan dari pemerintah, menjadi sebuah langkah yang cukup agresif dari AS untuk melindungi keamanan nasional dan infrastruktur krusial negara. Apabila terdapat sebuah kerusakan kecil dalam infrastruktur krusial ini, tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi aspek dan sistem lainnya. Apabila TikTok berkembang dan menjadi sebuah aplikasi yang dapat memberikan fasilitas yang semakin banyak dan lengkap—tak hanya menyediakan fitur *short video* — dan menjadi sebuah aplikasi dengan alat transaksi, maka hal ini menjadi sebuah kemungkinan yang perlu AS waspadai. Data pengguna akan semakin banyak tersimpan dan rentan untuk disalahgunakan. Inilah mengapa pemerintah ikut campur tangan dalam pembelian TikTok agar dapat mengawasi dan ikut mengendalikan konten agar tidak terjadi disinformasi maupun perkembangan atau perubahan aplikasi kedepannya. Langkah ini dapat dikatakan sebagai bentuk respon darurat dan tindakan yang melawan eksistensi ancaman yang dibenarkan. *Cyber attack* dan *cyber warfare* menjadi sebuah isu keamanan yang intens di peradaban yang

modern ini sehingga tidak dapat dipungkiri eksistensi seperti TikTok dapat menjadi sebuah ancaman bagi sebuah negara.

ByteDance menolak dengan diumumkannya dalam website resmi Microsoft yang dirilis pada tanggal 13 September 2020 bahwa ByteDance memberitahukan kepada pihak Microsoft bahwa mereka tidak akan menjual operasi TikTok AS ke Microsoft (Microsoft Corporate Blogs 2020). Berbanding terbalik dengan Microsoft, pada tanggal 20 September 2020, dalam website resmi Oracle menyatakan bahwa mereka terpilih menjadi penyedia *cloud secure* TikTok dan menjadi minoritas investor dengan saham sebesar 12,5% (Oracle 2020) dan Trump menanggapi dengan baik akan keputusan tersebut. Dalam hal ini, kedua negara memiliki kepentingan bersama membangun kepercayaan dalam *cyber conflict*, namun untuk menggabungkan kedua elemen ini—antara pemerintah dan perusahaan maupun perusahaan dengan perusahaan—dengan adanya strategi dan ketidakpercayaan antara dua kubu dan *cyber attack* (Segal 2013, 39).

Chief Technology Officer Oracle, Larry Ellison mengatakan Tiktok memilih Oracle karena Oracle memiliki infrastruktur *Cloud* Generasi 2 terbaru yang lebih cepat, lebih andal dan lebih aman dibandingkan dengan teknologi generasi pertama yang ditawarkan oleh penyedia cloud besar lainnya. Ia juga mengatakan bahwa Oracle IaaS (Infrastructure as a Service) mendapatkan skor kepuasan tertinggi dalam survey Industry Cloudpath 2020 yang dirilis oleh IDC (International Data Corporation) yang mana ia mensurvei 935 pelanggan IaaS tentang kepuasan mereka terhadap vendor IaaS teratas termasuk Amazon Web Service, Microsoft, IBM, dan Google Cloud. CEO Oracle Safra Catz menyatakan Tiktok akan berjalan di Oracle Cloud dan Oracle menjadi investor minoritas di

TikTok Global. Ia juga menjamin akan memberikan lingkungan yang sangat aman dan memastikan privasi data bagi pengguna TikTok di AS serta seluruh dunia. Dalam *press release* di website Oracle tersebut itu juga dikatakan *Cloud* Oracle Generasi 2 dibangun dari bawah ke atas untuk sepenuhnya mengisolasi aplikasi yang berjalan dan secara mandiri merespon ancaman keamanan. Oracle akan menggabungkan teknologi *cloud* amannya dengan tinjauan kode, pemantauan, dan audit berkelanjutan untuk memberikan jaminan yang belum pernah ada sebelumnya bahwa data pengguna TikTok AS bersifat pribadi dan aman (Oracle 2020).

Keinginan dari ByteDance untuk mengontrol penuh TikTok tidak hanya berdasar hanya karena mereka yang sepenuhnya memiliki aplikasi tersebut. Dilansir dari CNBC (21/09/2020), hal ini dikarenakan investor dan perusahaan Tiongkok memiliki persentase besar di TikTok dan memiliki suara di dewan perusahaan yang dibuat yang didirikan di AS bernama TikTok Global. Dan pernyataan Trump mengenai Oracle akan mengendalikan TikTok Global sepenuhnya adalah hal yang tidak benar. Hal ini dikarenakan menurut pernyataan Wakil Presiden Eksekutif Oracle, Ken Glueck yang dirilis kepada setelah pernyataan Trump ialah "saham TikTok akan didistribusikan kepada pemiliknya setelah berdirinya TikTok Global dan investasi yang dilakukan oleh Oracle. Orang Amerika akan menjadi mayoritas dan ByteDance tidak akan memiliki kepemilikan di TikTok Global". Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa dalam TikTok Global tidak ada kekuatan yang mendominasi baik antara AS maupun Tiongkok (Kovach and Boorstin 2020).

Dilansir oleh CNBC (21/09/2020), Bytedance selaku perusahaan induk TikTok bersikeras akan mengambil kendali penuh atas TikTok. ByteDance juga berencana untuk melakukan putaran pendanaan kecil pra-IPO (penawaran umum perdana) yang akan memberikan ByteDance 80% saham di TikTok Global. Terdapat pernyataan jika 40% dari ByteDance dimiliki oleh perusahaan modal ventura Amerika, maka pemerintahan Trump secara teknis dapat mengklaim TikTok Global, yang sebagian didorong oleh uangnya sendiri, yakni milik Amerika. Tagihan pajak $5 miliar yang ditentukan sebelumnya oleh ByteDance pada hari Senin, 21 September 2020 hanyalah "perkiraan" pajak perusahaan dan pajak lainnya yang harus dibayar TikTok Global seiring pertumbuhan bisnis dan selama beberapa tahun kedepan. Penentuan ini seharusnya mengukur bagaimana TikTok tumbuh, dan $5 miliar tersebut tidak ada di bawah perjanjian dengan Oracle. Oracle akan memeriksa kode sumber TikTok, tetapi ByteDance tidak akan mentransfer teknologi maupun algoritma yang dimiliki ke perusahaan AS (Kharpal 2020).

ByteDance dan Oracle mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang akan memenuhi permintaan Trump akan dijual ke perusahaan Amerika atau kemungkinan terburuk adalah dilarangnya TikTok di AS. Akan tetapi kedua belah pihak justru membingkai kesepakatan dengan kacamata yang berbeda dalam pernyataan publik.

Dalam pandangan Oracle terdapat beberapa poin yang mereka lihat dalam kesepakatan yang dilakukan, yakni;

a. Empat dari 5 kursi dewan di TikTok Global akan diduduki oleh warga AS,

b. 53% saham TikTok Global akan dipegang oleh investor AS apabila dihitung dengan perusahaan modal ventura AS seperti Sequioa, Tiger Management, dan General Atlantic. Hal ini diperbincangkan karena modal aktual yang mereka investasikan tidak perlu berbasis di AS dan dapat berasal dari mitra luar, walaupun investor ventura sering melakukan kontrol atas perusahaan yang mereka gunakan sebagai tempat investasi,

c. dan Oracle melihat pemegang saham individu ByteDance sebagai pihak yang berkepentingan, bukan sebagai entitas yang memiliki saham di TikTok Global.

d. Perusahaan-perusahaan AS mengatakan bahwa mereka akan membeli TikTok Global dengan dasar adanya mayoritas orang AS di kursi dewan direksi karena pihak-pihak tersebut akan menjadi "penenang" pemerintahan Trump untuk tidak melarang TikTok beroperasi di AS (Reuters 2020).

Sementara itu, ByteDance melihat kesepakatan ini;

a. ByteDance tidak memisahkan investor modal ventura Amerika dari pemangku kepentingan sehingga dapat dikatakan ByteDance akan memiliki 80% dari TikTok Global jika kesepakatan berhasil dan TikTok Global akan menjadi anak perusahaannya di AS,

b. CEO dari pendiri ByteDance, Zhang Yiming, akan memiliki kursi dewan di TikTok Global yang otomatis memberikan kekuasaan bagi ByteDance untuk memberikan sudut pandang dalam hal; tata kelola, walau ia kalah jumlah dalam kursi dewan.

Untuk sementara ini, Oracle dapat melihat kode sumber TikTok dan memblokir pembaruan yang terlihat bermasalah dari sudut pandang keamanan dan ByteDance tetap memegang kendali atas algoritma rekomendasi TikTok, yang mengatur video yang direkomendasikan dan menjadi kunci atas popularitas aplikasi (Kovach and Boorstin 2020). Walau Oracle telah memiliki saham dengan persentase yang cukup besar tersebut, pemegang kendali penuh terutama dalam algoritma TikTok Global selaku anak perusahaan tetap di tangan Tiongkok. Masih terdapat negosiasi saat pemilik TikTok di Tiongkok yang mengirimkan proposal ke Departemen Keuangan AS yang mana negosiasi terhambat dalam detail kesepakatan, kontrol algoritma yang dapat menampilkan konten tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang Amerika akan memiliki mayoritas 4-1 di dewan TikTok Global, sementara pemegang saham ByteDance—yang meliputi investor Amerika, Tiongkok, dan internasional—akan memiliki mayoritas saham sehingga TikTok tidak memiliki kekuatan mendominasi baik antara AS maupun Tiongkok. Oracle memiliki saham sekitar 12,5% dari TikTok Global dan ByteDance akan mempertahankan beberapa kendali atas kekayaan intelektual inti produk. Dengan kata lain, orang Amerika tidak akan memiliki kendali penuh atas perusahaan dari sudut kepemilikan, teknologi, maupu tata kelola. Dan yang terakhir adalah hal terpenting bagi Oracle dengan adanya kesepakatan yang diberikan TikTok adalah untuk menunjukkan komputasi *Cloud*. Oracle yang sebelumnya telah bermitra kontrak *Cloud* dengan Zoom akan menggunakan kesepakatan dengan TikTok sebagai media lain untuk menyediakan layanan keamanan dan *cloud* **(**Kovach and Boorstin 2020).

Dengan adanya penggunaan Tiktok yang masif terutama di kalangan remaja yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna TikTok di Amerika memberikan peringatan bagi AS untuk meningkatkan pengawasan ditambah dengan kondisi geopolitik Tiongkok-AS yang semakim memanas. Kecurigaan dilandasi oleh berbagai poin. Yang pertama, Tiongkok memiliki UU mengenai data yang mana untuk setiap perusahaan yang beroperasi di Tiongkok harus memberikan akses penuh ke pemerintah terhadap data-data yang dimiliki tanpa terkecuali. Kedua, terdapat laporan bahwa konten yang tersebar yang dipandang sensitif oleh pemerintah Tiongkok, dihapus tanpa diketahui. Dan poin terakhir, pemerintah AS melakukan tindakan tinjaun terhadap keamanan nasional terkait perusahaan dan pemiliknya dengan dasar kekhawatiran akan sensor politik dan bagaimana data pengguna disimpan (DeVoe 2019). Dalam pernyataan eksklusif Donald Trump pada 6 Agustus yang dirilis oleh whitehouse.com, TikTok dilaporkan menyensor konten seperti peristiwa protes di Hongkong, dan perilaku Tiongkok terhadap Uighur serta minoritas Muslim lainnya yang dianggap sensitif secara politik oleh Partai Komunis China;

"TikTok also reportedly censors content that the Chinese Communist Party deems politically sensitive, such as content concerning protests in Hong Kong and China's treatment of Uyghurs and other Muslim minorities." (The White House 2020).

3.3 Pengaruh Kebijakan Pelarangan TikTok terhadap Sejumlah Aktor

3.3.1 Respon dari Tiongkok

Dengan adanya tindakan pelarangan TikTok di AS dan perbedaan pandangan mengenai kesepakatan membuat pemerintah Tiongkok untuk mengomentari secara langsung terkait kesepakatan tersebut, meskipun kementerian luar negeri Tiongkok telah berkali-kali mengatakan untuk bersikap adil dalam menawarkan lingkungan yang adil dan tidak diskriminatif bagi perusahaan asing (Reuters 2020).

3.3.2 Respon dari ByteDance

TikTok sangat keberatan atas tuduhan ancaman pelarangan ini. Dalam website resminya, pihak TikTok mengatakan pemerintah AS dan administrasi mengabaikan berbagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin pasar dan pengguna AS seperti penyimpanan data dan server yang terpisah—yang ditempatkan di Amerika Serikat dan Singapura, personil utama dan staff yang direkrut merupakan orang Amerika hingga membangun perangkat lunak yang difungsikan sebagai penghalang untuk membantu dan memastikan bahwa TikTok menyimpan data pengguna AS secara terpisah dari pengguna produk ByteDance lainnya. TikTok melayangkan keluhan bahwa Perintah Eksklusif yang dikeluarkan sebagai cikal bakal penutupan TikTok di AS tidak ditemukan sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" seperti yang disyaratkan oleh *Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) dan mengabaikan proses hukum.

Tidak hanya itu, CFIUS yang telah melakukan peninjauan terhadap akuisisi ByteDance dengan Musical.ly di tahun 2019 atas pengamanan yang dimiliki TikTok dengan banyaknya dokumentasi, informasi hingga berkas secara

terperinci terkait langkah-langkah keamanan TikTok untuk memberikan kepastian yang lebih kuat atas keamanan data pengguna AS dilindungi dan tidak dapat diakses bahkan pemerintah Tiongkok sekalipun dinilai diabaikan oleh pemerintah AS.

3.3.3 Respon dari Oracle

Pelarangan TikTok dan kebijakan Trump untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan AS untuk melakukan pembelian TikTok tersebut memberikan peluang perusahaan AS untuk berlomba-lomba. Diawali dari Microsoft yang gagal namun dilain sisi Oracle menjadi perusahaan yang berhasil melakukan kerjasama dan membeli sebagian saham di ByteDance. Oracle sendiri melihat hal ini sebagai peluang mereka untuk membuktikan kinerja *secure cloud* generasi kedua mereka yang dijamin akan melindungi keamanan data pengguna TikTok AS sehingga pada akhirnya mereka dipercaya untuk bekerjasama dengan ByteDance untuk memfasilitasi cloud secure untuk menjamin data pengguna TikTok di AS.

3.3.4 Respon dari Publik

Kebijakan pelarangan ini banyak menimbulkan pertentangan dari pengguna aktif aplikasi ini. Aplikasi yang dapat digunakan oleh hampir semua umur dan dijangkau oleh banyak orang menjadikan TikTok sebagai media bagi masyarakat Amerika untuk menyampaikan aspirasi politik, pendapat, kritik, *act of speech* hingga menyalurkan ekspresi mereka terhadap berbagai fenomena yang ada, khususnya bagi anak muda dan remaja. Tindakan pelarangan ini akan memberikan dampak yang sangat drastis dalam menyampaikan komentar dan ekspresi politik dalam ruang lingkup anak muda. Gerakan aktivisme, protes dan

pembicaraan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap perpolitikan yang sedang terjadi menjadi lebih mudah dilakukan, lebih luas penyebarannya dengan adanya media TikTok ini. Pelarangan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap anak muda namun tidak untuk orang tua.

Aplikasi sebelumnya seperti Dubsmash dan aplikasi video pendek lainnya namun banyak pendapat yang menyatakan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut tidak sama dengan TikTok. Pendapat ini dapat didasari dengan TikTok yang memiliki algoritma yang dipegang oleh ByteDance dan dinilai menjadi kunci sukses berkembangnya TikTok hingga saat ini. Dengan jumlah pengguna yang cukup banyak di Amerika, tentu berefek cukup besar bagi banyak pihak baik pemilik TikTok hingga penggunanya.

3.4 Akhir Dari Kebijakan Pelarangan TikTok di AS

Dengan adanya perbedaan pandangan dalam melihat kesepakatan yang ada, kebijakan pelarangan ini terus ditunda dikarenakan berhimpitan dengan agenda pemilihan presiden Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020. Kebijakan pelarangan ini pun berlanjut hingga ke masa pemerintahan Joe Biden.

Pelarangan aplikasi TikTok pun terus diundur dan ditunda seiring menyusun persyaratan dari kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Dilansir dari Bloomberg yang dikutip oleh New York Post (02/10/2020), ByteDance masih dalam proses menyusun proposal dengan Komite Investasi Asing di AS dan Oracle sendiri masih berusaha menyelesaikan persyaratan dari kesepakatan tersebut (Manskar 2020).

Permasalahan mengenai kesepakatan tersebut terkait dengan kesepakatan kepemilikan Tiongkok atas TikTok Global, pernyataan keamanan data, dan kemungkinan pembentukan dana pendidikan yang telah diminta oleh Trump sebelumnya apabila TikTok akan beroperasi kembali setelah kesepakatan dicapai. Permasalahan ini pun berlanjut hingga ke masa pemerintahan Joe Biden.

BAB 4
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dua negara yang terkenal dengan negara raksasa digital karena memiliki perusahaan teknologi serta aplikasi-aplikasi khususnya aplikasi sosial media yang sering sekali digunakan.. Di era digital, penggunaan internet semakin meningkat dengan adanya *networking* yang memudahkan manusia untuk mengakses segala informasi. Kehadiran media sosial pun memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh aktor-aktor yang terlibat. Di era globalisasi ini, keamanan menjadi sebuah isu yang sama pentingnya dengan ekonomi karena merupakan hal yang sangat rentan terancam. Sekuritisasi yang dulu dikenal karena ada ancaman objektif, namun sekuritisasi berkembang dan memberikan pandangan baru bahwa ancaman keamanan tak hanya karena adanya ancaman objektif namun juga ancaman subjektif.

Tiongkok menjadi sebuah negara yang telah menduduki posisi negara hegemon ekonomi dunia. Dan Tiongkok kini ingin menjadi sebuah negara *cyber hegemon* memungkinkan adanya rivalitas antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemunculan TikTok yang menjamur di AS dengan jumlah pengguna yang banyak, memberikan ancaman tersendiri bagi AS. Lewat *speech act* yang dilakukan oleh Mike Pompeo dan Presiden Donald Trump menyatakan TikTok sebagai bentuk dari ancaman keamanan nasional bagi AS karena adanya kecurigaan pencurian data pribadi warga AS yang menggunakan TikTok. TikTok pun terancam untuk dilarang dari AS.

Pada bab 1 sudah dijelaskan bahwa media sosial saat ini telah menjadi sebuah alat untuk memperoleh informasi, alat dalam perwujudan *freedom from speech*, hingga alat untuk berpolitik dan demokrasi. Namun teknologi yang terus berkembang di media sosial memungkinkan adanya permasalahan seperti disinformasi, pencurian data, hingga mengancam keamanan dan privasi negara.

Di bab 2 sendiri dijelaskan bahwa TikTok merupakan aplikasi yang sebelumnnya telah mengakuisisi Musical.ly pada tahun 2017 dan akhirnya dirilis secara global di tahun yang sama dan pertumbuhan pengguna TikTok di AS sangat tinggi. Kemudia dijelaskan juga persentase terkait digital literacy masyarakat AS, dan yang terakhir adalah pengaplikasian teori sekuritisasi menurut Buzan dalam langkah atau proses sekuritisasi pelarangan TikTok di AS.

Sedangkan dalam bab 3 terdapat uraian Tiongkok menjadi ancaman ekonomi dan politik bagi Amerika Serikat, tindakan dan perbedaan kesepakatan yang dilakukan Oracle terkait penyediaan *cloud secure* dan kepemilikan saham TikTok serta respon dari berbagai pihak terkait pelarangan TikTok di AS.

4.2 Rekomendasi

Untuk penulis-penulis kedepannya terdapat beberapa saran untuk menulis tulisan-tulisan baru adalah untuk membahas bagaimana kedepannya di masa Presiden Joe Biden dalam menyelesaikan permasalahan pelarangan TikTok yang belum menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak agar TikTok tidak diblokir di AS. Dikarenakan terdapat perbedaan pandangan dalam melihat kesepakatan yang ada, perlu dijelaskan bagaimana penyelesaian isu ini di masa pemerintahan Biden, bagaimana pemerintah dan perusahaan yang bersangkutan bertindak dalam kebijakan pelarangan yang dicetuskan oleh Donald Trump ini. Hal ini menurut

penulis perlu diteliti karena Donald Trump dan Joe Biden memiliki sifat pemerintahan dan pandangan yang berbeda sehingga keputusan yang dibuat pun dapat berbanding terbalik. Pembahasan ini pun dapat dilihat dengan berbagai teori dan sektor yang berbeda seperti dalam pandangan politik luar negeri, keamanan, hingga ekonomi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Arooj. 2020. "TikTok reveals the actual numbers of users in the US and rest of the world along with stats showing its growth since 2018." Digital Information World. https://www.digitalinformationworld.com/2020/08/tiktok-reveals-the-actual-numbers-of-active-users-in-the-us-world.html.

Anderson, Monica, and Emilya A. Vogels. 2019. "Americans and Digital Knowledge." Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2019/10/09/americans-and-digital-knowledge/.

Arisanto, Puguh T., and Adi Wibawa. 2021. "Perang Dagang Era Donald Trump sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat." *Indonesian Journal of International Relation* V, no. 2 (Juli): 163-183. 10.32787/ijir.v5i2.222.

Auxier, Brooke, and Monica Anderson. 2021. "Social Media Use in 2021." Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/.

Bartz, Diane, and Alexandra Hudson. 2021. "Bill to ban TikTok on U.S. government devices passes committee." Reuters. https://www.reuters.com/technology/bill-ban-tiktok-us-government-devices-passes-committee-2021-05-12/.

BBC. 2020. "Why has TikTok been banned in India? - CBBC Newsround." BBC. https://www.bbc.co.uk/newsround/53266068.

BBC News. 2020. "India bans TikTok, WeChat and dozens more Chinese apps." BBC. https://www.bbc.com/news/technology-53225720.

Chen, Hsuan T., and Younghwan Kim. 2016. "Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-cutting and like-minded perspectives." *Telematics and Informatics* 33, no. 2 (May): 320-330.

Collins, Katie. 2020. "Senators want to ban TikTok from US government devices over espionage fears." CNET. https://www.cnet.com/tech/services-and-software/senators-try-to-ban-tiktok-from-us-government-devices/.

Devin, Kat, Christine Huang, and Laura Silver. 2019. "U.S. Views of China Amid Trade War Turn Sharply Negative." Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/global/2019/08/13/u-s-views-of-china-turn-sharply-negative-amid-trade-tensions/.

DeVoe, Robert. 2019. "Is TikTok Secretly Sending Your Private Data to China?" Screen Rant. https://screenrant.com/tiktok-secretly-sends-data-china-lawsuit/.

Finnegan, Conor, Catherine Thorbecke, and Karson Yiu. 2020. "US looking at banning Chinese social media app TikTok as security threat: Pompeo." ABC News. https://abcnews.go.com/Politics/us-banning-chinese-social-media-app-tiktok-security/story?id=71647269.

Fung, Brian. 2020. "TikTok is a national security threat, US politicians say. Here's what experts think." CNN. https://edition.cnn.com/2020/07/09/tech/tiktok-security-threat/index.html.

Gates, William, and David Skidmore. 1997. "After Tiananmen: Tahe Striggel over U.S Policy toward China in the Bush Administration." *Presidential Studies Quarterly* 27:514-539.

Hadiwinata, Sugeng B. 2017. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hayoung, Sun. 2019. "The U.S.-China Tech War: Impacts and Prospects." *China Quarterly of International Strategic Studies* V (02): 197-212. 10.1142/S237774001950012X.

Heater, Brian. 2020. "Trump adds another year to Huawei/ZTE ban." Techcrunch+. https://techcrunch.com/2020/05/14/trump-adds-another-year-to-huawei-zte-ban/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlL&guccounter=1.

Hosain, Md S. 2019. "Huawei ban in the US: Projected consequences for international trade." *International Journal of Commerce and Economics* 1, no. 2 (April): 22-25.

Huang, Dianlin, Ying Huang, and Weishan Miao. 2021. "More than business: The de-politicisation and re-politicisation of TikTok in the media discourses of China, America and India (2017–2020)." *Media International Australia*, 1-8. 10.1177/1329878X211013919.

Kartasasmita, Giandi, and Andrea P. Kurnadi. 2020. "The Securitization of Chinese Technology Companies in the United States of America." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* XVI, no. 2 (December): 159-178.

Kelion, Leo. 2020. "TikTok: Oracle confirms being picked by Bytedance to be app's partner." BBC. https://www.bbc.com/news/technology-54148684.

Kemp, Simon. 2021. "Digital 2021 October Global Statshot Report — DataReportal – Global Digital Insights." DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot.

Kharpal, Arjun. 2020. "ByteDance says it'll own 80% of US-based TikTok Global, refutes $5 billion taxes claim." CNBC. https://www.cnbc.com/2020/09/21/bytedance-says-it-will-own-80percent-of-tiktok-us-refutes-5-billion-taxes-claim-.html.

Kovach, Steve, and Julia Boorstin. 2020. "TikTok deal splits control between US and Chinese owners." CNBC. https://www.cnbc.com/2020/09/21/tiktok-deal-splits-control-between-us-and-chinese-owners.html.

Kurnia, Novi. 2005. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi." *MediaTor* VI, no. 2 (December): 291-296.

Kusumawardhani, Elisa, and Deasy S. Sari. 2021. "Gelombang Pop CultureTikTok: Studi kasus Amerika Serikat, Jepang, India dan Indonesia." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* III (January): 19-31. 10.24198/padjir.v3i1.27758.

Manskar, Noah. 2020. "Final TikTok deal could be delayed until after November election." New York Post. https://nypost.com/2020/10/02/final-tiktok-deal-could-be-delayed-until-after-november-election/.

Microsoft Corporate Blogs. 2020. "Microsoft statement on TikTok - The Official Microsoft Blog." The Official Microsoft Blog. https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/13/microsoft-statement-on-tiktok/.

Moore, Cortney. 2019. "Americans and Digital Knowledge." Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2019/10/09/americans-and-digital-knowledge/.

Musil, Steven. 2018. "Huawei executive arrested in Canada at US request." CNET. https://www.cnet.com/news/huawei-executive-arrested-by-canadian-officials-at-us-request/.

Musil, Steven. 2020. "TikTok ban won't prevent employees from being paid, US says in filing." CNET. https://www.cnet.com/tech/mobile/tiktok-ban-wont-prevent-employees-from-being-paid-us-says-in-filing/.

Oracle. 2020. “Oracle Chosen as TikTok’s Secure Cloud Provider.” Oracle. https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-chosen-as-tiktok-secure-cloud-provider-091920/#:~:text=Oracle%20Corporation%20%28NYSE%3A%20ORCL%29%20announced%20today%20that%20it,video%20conferencing%20capacity%20to%20the%20Oracle%20Public%20Cloud.

Reichert, Corinne. 2020. “US finds Huawei has backdoor access to mobile networks globally, report says.” CNET. https://www.cnet.com/tech/mobile/us-finds-huawei-has-backdoor-access-to-mobile-networks-globally-report-says/.

Reuters. 2020. “China unlikely to OK 'unfair' TikTok deal, state-run paper says.” NBC News. https://www.nbcnews.com/news/world/china-unlikely-approve-tiktok-deal-oracle-walmart-state-owned-paper-n1240676.

Ross, Andrew L. 2014. “The Arms Dynamic in World Politics. By Barry Buzan and Eric Herring. Boulder,” Book Reviwe. American Political Science Review ed. No. 3. Cambridge University Press.

Segal, Adam. 2013. “The code not taken: China, the United Staes, and the Future of cyber espionage.” *Bulletin of the Atomic Scientists*, (September), 38-45. 10.1177/0096340213501344.

Sherman, Alex. 2020. “TikTok reveals US, global user growth numbers for first time.” CNBC. https://www.cnbc.com/2020/08/24/tiktok-reveals-us-global-user-growth-numbers-for-first-time.html.

Singer, Peter W., and Allan Friedman. 2014. *Cybersecurity: What Everyone Needs to Know*. United States of America: OUP USA.

Stolyar, Brenda, and Christian de Looper. 2018. “ZTE and the US: Everything You Need to Know.” Digital Trends. https://www.digitaltrends.com/mobile/commerce-bans-zte-from-exporting-technology-from-the-us/.

Susanto, Eko H. 2017. “Media Sosial sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik.” *Jurnal ASPIKOM* III (July): 379-398..

TikTok Company. 2020. “Why we are suing the Administration | TikTok Newsroom.” Newsroom | TikTok. https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-files-lawsuit.

VOA Students Union. 2020. China's TikTok Keeps Growing Among US Youth. https://www.voanews.com/a/student-union_chinas-tiktok-keeps-growing-among-us-youth/6185351.html.

Wardhana, Agastya. 2018. “Grand Strategy Obama: Pivot to Asia.” *Global & Strategis*, 59-77.

The White House. 2020. “Executive Order on Addressing the Threat Posed by TikTok.” The White House Archive. https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-posed-tiktok/.

The White House. 2020. “Text of a Letter to the Speaker of the House and President of the Senate on Addressing the Threat Posed by TikTok.” Trump White House Archive. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/text-letter-speaker-house-president-senate-addressing-threat-posed-tiktok/.

Wilde, Jaap d., Research Professor of International Studies Centre for the Study of Democracy B. Buzan, Barry Buzan, Ole Wver, and Ole Wæver. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. N.p.: Lynne Rienner Pub.

William, Paul D. 2011. “The Evolution of International Security Studies. By Barry Buzan and Lene Hansen.” Cambridge University Press.

William, Paul D. 2011. “The Evolution of International Security Studies. By Barry Buzan and Lene Hansen.” Book Review. Perspectives on Politics ed. No. 1. Cambridge University Press.